



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS (RENTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintahan daerah wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun Renstra sebagai penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu Institusi Teknis dalam melaksanakan Pembangunan di Kota Padang Panjang.

Renstra merupakan acuan dalam pelaksanaan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Periode 5 (lima) tahun yaitu 2018-2023 yang merupakan hasil integrasi dari rencana-rencana pembangunan pusat, regional dan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam kaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrument pertanggungjawaban, Renstra merupakan salah satu pedoman untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam jangka 1 hingga 5 tahun dan diukur dari besarnya capaian indikator pelayanan untuk masing-masing program dan kegiatan. Perencanaan strategis instansi pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik regional, nasional maupun global.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mengatur tentang sistem, mekanisme, proses dan prosedur dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan dan Padang Panjang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 -2032;
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 ini dimaksudkan untuk menyediakan

dokumen yang dapat dijadikan sebagai acuan resmi bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, swasta dan masyarakat luas dalam pembangunan bidang infrastruktur dasar ke-PU-an dan penataan ruang di Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjabarkan secara umum kondisi awal urusan Pekerjaan Umum, urusan Penataan Ruang dan Pertanahan di Kota Padang Panjang sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023;
2. Memberi arah, kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan tahun Tahun 2018-2023;
3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian dan pertanggung jawaban sekaligus evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dalam kurun kinerja strategis 2018-2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG

Menjelaskan tentang peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah baik SDM dan Aset, Pencapaian

Kinerja Pelayanan serta Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan, dan isu-isus strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisikan tentang Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2018- 2023.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang dalam 5 tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Memuat indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara langsung memperlihatkan kinerja yang telah dan akan dicapai dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Padang Panjang melalui Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang mencakup urusan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang dan bidang pertanahan.

Adapun rincian urusan sebagaimana tersebut diatas dapat diuraikan dalam Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Bina Program, Perencanaan dan Jasa Konstruksi, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Pendaftaran dan Program; dan
 3. Seksi Bina Jasa Konstruksi.
 - d. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri dari;
 1. Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air.

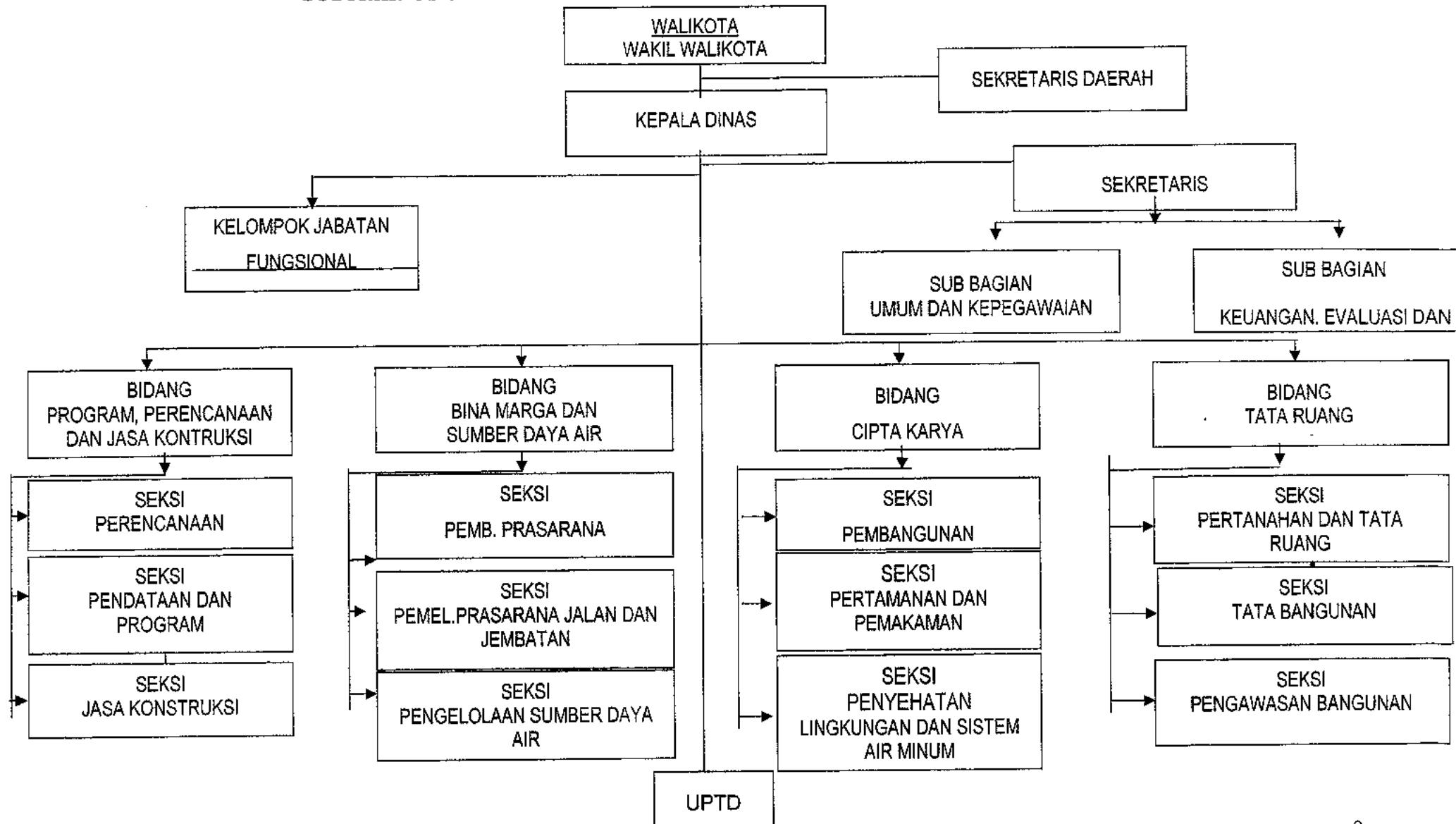
E. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan;
2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman; dan
3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum.

F. Bidang Tata Ruang, terdiri Dari;

1. Seksi Pertanahanan dan Tata Ruang;
 2. Seksi Tata Bangunan; dan
 3. Seksi Pengawasan Bangunan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**



2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Pertanahanan dan tugas pembantuan yang diberikan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sekretaris

Sekretariat dikelola oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan

surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumah tanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pemberian dukungan dibidang kerumah tanggaan, humas, keprotokolan, organisasi dan tataksana serta fasilitasi pembentukan produk bukum;
- c. penatausahaan barang milik daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penatausahaan keuangan;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3 Bidang Bina Program, Perencanaan dan Jasa Konstruksi

Bidang Bina Program, Perencanaan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang perencanaan, pendataan dan program serta bina jasa konstruksi.

Bidang Bina Program, Perencanaan dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pendataan dan program;

- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bina jasa konstruksi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.1 Seksi Perencanaan

Seksi Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan di bidang pekerjaan umum dalam arti melaksanakan penyusunan,perencanaan dan pengkoordinasian serta memberikan bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan skala kota.

Seksi Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. pemeriksaan perencanaan pembangunan dalam skala kota;
- b. pemberian bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan analisa satuan pekerjaan pembangunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.2 Seksi Pendataan dan Program

Seksi Pendataan dan Program mempunyai tugas menyelenggarakan program pendataan dan program dalam arti mengumpul, menghimpun, mengolah dan mengkoordinasikan data dan menyusun program kerja dinas dengan berkoordinasi dengan unit kerja.

Seksi Pendataan dan Program mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penyusunan rencana kerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pendokumentasian data dan informasi kegiatan;
- d. pengkoordinasian penyusunan anggaran belanja dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

2.1.3.3. Seksi Bina Jasa Konstruksi

Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan program bina jasa konstruksi dalam arti merencanakan, meriyapkan, melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha jasa konstruksi wilayah kota.

Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. penerbitan rekomendasi perizinan jasa konstruksi;
- b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan program jasa konstruksi;
- c. penyusunan profil jasa konstruksi;
- e. pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

2.1.4 Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air

Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air.

Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4.1 Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan

Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan, peningkatan prasarana jalan dan jembatan dalam arti menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan skala kota.

Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- c. penyiapan bahan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang jalan;

- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkattan jalan dan jembatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4.2 Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan

Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan program pemeliharaan prasarana jalan, jembatan dalam arti melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin, berkala dan periodik pada jalan dan jembatan, riol, berm yang ada dalam skala kota.

Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program kegiatan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- c. penyiapkan konsep rencana perbaikan jalan dan jembatan;
- d. pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemelibaran jalan dan jembatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4.3 Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan sumber daya air dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perizinan dan pemanfaatan pengairan serta penanggulangan darurat kerusakan infrastruktur sumber daya air akibat bencana atau daya rusak air.

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- c. pembinaan perizinan pemanfaatan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5 Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bangunan gedung, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan sesuai dengan ketentuan perundangan undangan.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pertamaman dan pemakaman;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyehatan lingkungan dan sistem air minum; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5.1 Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan daerah dalam arti melaksanakan pembangunan, bantuan teknik, pengawasan, pengendalian pembangunan bangunan gedung negara dan bangunan umum serta pengaturan dan pengendalian perizinan pembangunan.

Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pembangunan keciptakaryaan skala kota;
- b. Pelaksanaan program pembangunan keciptakaryaan;
- c. Pembinaan perizinan bangunan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5.2 Seksi Pertamaman dan Pemakaman

Seksi Pertamaman dan Pemakaman mempunyai tugas menyelenggarakan program pertamaman dan pemakaman dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pemeliharaan dan perbaikan, sarana prasarana pertamaman, penerangan jalan umum, lampa hias dan pemakaman umum serta ruang terbuka hijau (RTH) dalam wilayah kota.

Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pertamanan dan pemakaman skala kota;
- b. Pelaksanaan penataan pertamanan dan pemakaman;
- c. Penataan penerangan jalan umum dan lampu hias dalam kota; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5.3 Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum

Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum mempunyai tugas menyelenggarakan program penyehatan lingkungan dan sistem air minum dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pembangunan dan pelaporan perkembangan sarana dan prasarana di bidang teknik penyehatan lingkungan yang meliputi urusan-urusan air bersih, air buangan, kawasan kumuh, dan perbaikan/pemeliharaan drainase dalam kota serta pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala kota;
- b. Pelaksanaan pembangunan pemeliharaan sarana prasarana penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala kota;
- c. Pemeleiharaan sarana prasarana penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala kota; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.6. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pertanahan dan tata ruang, penataan bangunan dan pengawasan bangunan.

Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pertanahan dan penataan ruang;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penataan bangunan;

- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan bangunan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.6.1 Seksi Pertanahan dan Tata Ruang

Seksi Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan program pertanahan dan penataan ruang dalam arti melaksanakan perencanaan, penelitian, pengumpulan dan pengolahan data untuk perencanaan pembangunan daerah serta mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi perkembangan pembangunan fisik kota sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, pemanfaatan lingkungan, kemungkinan pengembangan fisik kota, serta menyelenggarakan pelayanan Advice Planning kepada masyarakat.

Seksi Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pertanahan dan tata ruang skala kota;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan lahan;
- c. Penrosean penerbitan advice planning dan rekomendasi perizinan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.6.2 Seksi Tata Bangunan

Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan program penataan bangunan dalam arti melaksanakan penataan bangunan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), struktur bangunan dan persyaratan serta mengkoordinir penerimaan sumber-sumber pendapatan di bidang tata ruang dan tata bangunan.

Seksi Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program tata bangunan skala kota;
- b. Pelaksanaan program tata bangunan skala kota;
- c. Pemeriksaan persyaratan teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Pertimbangan teknis penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.6.3 Seksi Pengawasan Bangunan

Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan program pengawasan bangunan dibidang tata ruang dan tata bangunan dalam arti melaksanakan pengawasan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengkoordinasian terhadap penataan bangunan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), mengawasi struktur bangunan masyarakat serta mengevaluasi hasil-hasil pemanfaatan ruang dan penataan bangunan.

Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan bangunan;
- b. pengawasan pelaksanaan tata ruang dan tata bangunan;
- c. pengawasan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan IMB; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disamping memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 50 orang, juga dibantu 56 Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai pelaksana operasional di lapangan maupun perbantuan administratif pada dinas.

Tabel 2. 1
Komposisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Golongan

NO	KLASIFIKASI GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Pembina; Golongan IV	5	10 %
2.	Penata; Golongan III	29	58 %
3.	Pengatur; Golongan II	15	30 %
4.	Juru; Golongan I	1	2 %
Jumlah		50	100 %

Sumber: *Bezetting Dinas PU/PR Kondisi November 2018*

Tabel 2. 2

Komposisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	SD	1	2 %
2.	SLTP	1	2 %
3.	SLTA	11	22 %
4.	Diploma (D3)	7	14 %
5.	Sarjana (S1)	25	50 %
6.	Pasca Sarjana/ Master (S2)	5	10 %
Jumlah		50	100 %

Sumber: Bezetting Dinas PUPR Kondisi Nopember 2018

Berdasarkan Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 terlihat bahwa ASN terdidik, dengan jenjang pendidikan (Diploma, Strata, dan Pasca Sarjana) sebanyak 69.70% atau dapat dikatakan perbandingan antara tenaga terdidik dan tenaga operasional adalah 2:1. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas SDM di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkantor berada pada kondisi mampu untuk menyediakan layanan yang berkualitas bagi masyarakat, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pencapaian Kinerja Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sampai dengan tahun 2016 dari indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 terlihat pada Tabel 2.3.1 berikut:

2.3.1 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan kondisi Bulan November 2018 (digambarkan pada Tabel 2.3):

Tabel 2. 3

Inventaris Sarana dan Prasarana Dinas PUPR

NO	JENIS SARANA PRASARANA	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1.	Peralatan Kantor	143	-	1	144
	a. Meja & Kursi	35	-	5	40
	b. Komputer/laptop	10	-	4	14
2.	c. Printer	2	-	-	2
	Bangunan				
3.	Kendaraan Bermotor				
	a. Sepeda Motor	18	1	-	19
	b. Minibus	5	-	-	5
	c. Pick-up	2	2	-	4
	d. Truck Tangga	1	-	-	1
	e. Truck Crane	1	-	-	1
	f. Truck Tangki	1	-	-	1

Sumber: Lap. Asset Dinas PUPR Kondisi Nopember 2018

Adapun Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di antaranya adalah panjang jalan menurut status jalan, panjang jalan menurut kondisi jalan dan panjang jalan menurut jenis jalan. Bila diperhatikan secara cermat mengenai perkembangan kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Padang Panjang terutama dari sisi indikator panjang jalan menurut kondisi jalan ternyata panjang jalan yang mantap cenderung mengalami peningkatan. Artinya selama periode tahun 2015 – 2017 capaian indikator kinerjanya selalu mencapai sebesar 100 %. Selanjutnya bila diperhatikan capaian ketiga indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, ternyata capaian kinerjanya hampir semuanya mencapai 100 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa kinerja dari urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ini ternyata cukup bagus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.4.

Panjang Jalan Menurut Status, Kondisi dan Jenis di Kota Padang Panjang, Tahun 2015 – 2017

No	Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018
	Panjang [km]	Panjang (%)	Panjang [km]	Panjang (%)	Panjang [km]
1	Panjang jalan menurut status jalan:	94,72	100	106,28	100
- Negara	11,00	11,61	11,829	11,12	11,83
- Propinsi	0	0	0	0	0
- Kota	83,72	88,3	94,456	88,87	94,456
2	Panjang jalan menurut kondisi jalan:	94,72	100	106,28	100
- Baik/mantap	80,69	85,1	96,038	92,27	93,97
- Sedang	5,53	5,84	0,920	1,43	1,814
- Rusak	2,49	2,63	3,467	1,62	4,641
- Rusak berat	6,01	6,35	5,86	4,67	5,86
3	Panjang jalan menurut jenis jalan:	94,86	100	106,28	100
- Aspal	87,86	92,61	96,89	90,49	97,024
- Kerikil	0,41	0,43	0,075	0,07	0,075
- Tanah	6,6	6,96	9,32	8,64	9,19
	Sumber : Dinas PUPR Kota Padang Panjang, Tahun 2018				

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jalan di Kota Padang Panjang secara keseluruhan pada tahun 2017 adalah sepanjang 106,285 km yang terdiri atas 11,829 km jalan Negara (11,12 persen) dan 94,46 km jalan Kota (88,88 persen). Sedangkan menurut kondisi jalan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan atau penambahan panjang jalan yang mengalami penurunan kualitas dari kondisi baik atau mantap menjadi sedang dan rusak.

Pada tahun 2016 jalan dengan kondisi mantap tercatat 96,97 km dan tahun 2017 berkurang menjadi 93,97 atau 88,41 persen. Jalan dengan kondisi sedang juga mengalami peningkatan dari 1,520 km (1,43 persen) tahun 2016 menjadi 1,814 km atau 1,71 persen pada tahun 2017. Sedangkan jalan dengan kondisi rusak juga mengalami peningkatan dari 1,725 km atau 1,62 persen tahun pada 2016 menjadi 4,641 km atau 4,37 persen pada tahun 2017.

Sementara itu, jalan dengan kondisi rusak berat juga bertambah dari 4,965 km atau 4,67 persen pada tahun 2016 menjadi 5,86 km atau 5,51 persen pada tahun 2017. Ditinjau dari jenis jalan tercatat bahwa 96,174 km jalan aspal (90,49 persen), 0,075 km jalan kerikil (0,07 persen) dan 9,186 km jalan tanah (8,64 persen). Meskipun secara keseluruhan panjang jalan yang mantap dan bagus sudah mencapai di atas 90 %, namun demikian

masih ada beberapa jalan yang masih perlu lebih disempurnakan. Untuk newujukan hal itu, maka program dan kegiatannya perlu dimasukkan didalam Renstra periode mendatang, sehingga benar-benar bisa direalisasikan.

Dalam hal penataan ruang, difokuskan pada ruang terbuka hijau (RTH) dan bangunan ber IMB per satuan bangunan. Ruang Terbuka Hijau masih relatif rendah dimana pada tahun 2016 baru hanya sebesar 6,88 dan kemudian meningkat menjadi 6,92. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian kinerja urusan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.5
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang
di Kota Padang Panjang, Tahun 2013-2018**

No	Urusan / Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja						
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Pekerjaan Umum								
1	Pemetaan jaringan jalan dan jembatan setiap tahun	km	83.71 km	83.71 km	83.71 km	94.45 Km	94.45 Km	94.45 Km	
2	Persentase Rumah Tinggal bersanitasi Layak	%	-	67,99%	69%	70%	71,72%	72,13%	
3	Persentase rumah tangga mendapatkan akses air minum yang aman	%	87,29%	88,56%	88,56%	89%	91,09%	92,65%	
2	Penataan Ruang								
1	Jumlah advice planning yang dikeluarakan	Buah	126	111	97	106	118	114	
2	Keberadaan PERDA RTRW men	Doku	1	-	-	-	-	-	
3	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan keseluruhan	Rasio	3157/82	3317/ 82	3463/ 8516	3639/ 8692	3816/88 69	3930/898 3	
4	Persentase RTH Publik dan Privat	%	-	-	-	-	6.88%	6.92%	6,99%
3	Pertanahan								
1	Penyelesaian konflik pertanahan	Kasus	1	1	2	2	2	0	

Sumber : Dinas PU/PR Kota Padang Panjang, Tahun 2018

Berdasarkan data dalam tabel diatas meskipun rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan keseluruhan meningkat dari 966/8258 pada tahun 2013 menjadi 1602/8894 (18,01) pada tahun 2017, namun demikian rasio tersebut masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2. 6
Jalan di Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2018

Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Permukaan	Satuan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Panjang Jalan nasional**	Km	11,140	11,140	11,140	11,965	11,965	11,965
Dj Aspal	Km	11,140	11,140	11,140	11,965	11,965	11,965
Panjang Jalan Kabupaten/Kota*	Km	83,715	83,715	83,715	94,456	94,456	94,456
Dj Aspal	Km	76,895	76,715	76,715	86,546	84,025	83,955
Rd Beton	Km	0	0	0	0,910	0,910	2,060
Kerikil	Km	0,405	0,405	0,230	0,230	0,050	0,050
Tanah	Km	5,860	5,860	5,860	9,341	8,441	

Sumber: Data Infrastruktur ke-PU-an dalam angka tahun 2018

Dari Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa prasarana jalan yang ada di Kota Padang Panjang pada tahun 2017 dengan panjang total adalah 106,421 km dengan rincian yang merupakan jalan dengan permukaan aspal dengan panjang 95,99 km, permukaan beton dengan panjang 0,910 km, permukaan kerikil dengan panjang 0,050 km dan permukaan masih tanah dengan panjang 9,341 km. Berdasarkan data kondisi tersebut masih perlu upaya peningkatan dan pemeliharaan jalan pada tahun yang akan datang dalam rangka meningkatkan aksesibilitas

Tabel 2. 7
Jembatan di Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2018

JEMBATAN DAN KONDISI BERDASARKAN ADMINISTRASI Pemerintahan	SATUAN	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Jembatan Kota	Unit	11	11	11	11	11	11
Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Baik	Unit	10	10	10	10	10	10
Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Rusak Ringan	Unit	1	1	1	1	1	1

Sumber: Data Infrastruktur ke-PU-an dalam angka tahun 2018

Dari data Tabel 2.7 menunjukkan bahwa jumlah sarana dan prasarana jembatan di Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 11 jembatan. Kondisi dari jembatan adalah 10 unit dengan kondisi baik dan 1 unit dengan kondisi rusak ringan. Berdasarkan data kondisi tersebut masih perlu upaya peningkatan dan pemeliharaan jembatan pada tahun yang akan datang dalam rangka meningkatkan aksesibilitas.

2.3.2 Urusan Pekerjaan Umum; Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air

Sarana dan prasarana di bidang pengelolaan sumber daya air, sampai dengan akhir tahun 2017 telah terlaksana kegiatan pembangunan pengelolaan sumber daya air dengan hasil sebagai mana tercantum dalam tabel berikut:

Sarana dan prasarana di bidang pengelolaan sumber daya air, sampai dengan akhir tahun 2018 telah terlaksana kegiatan pembangunan pengelolaan sumber daya air dengan hasil sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Kondisi Sarana Prasarana Pengairan Tahun 2018

NAMA DILAKUKAH PRAKASI	LUAS AREA L [HA]	KONDISI DAERAH IRIGASI (%)			KONDISI AREAL [HA]			Ket
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	
bagek	9,699	65	15	10	10	6,304	1,455	0,970
kandung	4,047	50	20	15	15	2,024	0,809	0,607
ken dalem	38,455	45	20	20	15	17,305	7,691	7,691
mek	13,650	70	10	10	10	9,555	1,365	1,365
jeliput	10,795	80	10	10	0	8,636	1,080	-
mek keliling	13,045	70	10	10	10	9,132	1,305	1,305
mek baru	6,418	65	15	10	10	4,172	0,963	0,642
apeung keis	16,663	40	18	12	30	6,665	2,999	2,000
mek jenggan	57,955	65	12	15	8	37,677	6,956	8,695
mek belai	4,153	75	10	8	7	3,115	0,415	0,332
ruko rayo	12,203	70	17	8	5	8,542	2,075	0,976
mekrah baukue	23,381	60	20	10	10	14,029	4,676	2,338
jawrah kubang	15,750	65	18	10	7	10,238	2,835	1,575
								1,103

Kondisi daerah Daerah Oasi	luas areal (ha)	Kondisi daerah irrigasi (%)			Kondisi areal (ha)				Ket
		Baik	Rusak ringan	Rusak sedang	Baik	Rusak ringan	Rusak sedang	Rusak berat	
baik/tami	9,337	63	15	12	10	5,882	1,401	1,120	0,934
baik	30,574	62	12	14	12	18,956	3,669	4,280	3,669
rusak	3,894	70	17	10	3	2,726	0,662	0,389	0,117
rusak	8,990	75	12	11	2	6,743	1,079	0,989	0,180
tarok	27,533	70	18	12	0	19,273	4,956	3,304	-
pelsah	10,392	60	8	15	17	6,235	0,831	1,559	1,767
tarok	11,784	64	12	17	7	7,542	1,414	2,003	0,825
eur	8,218	68	15	12	5	5,588	1,233	0,986	0,411
mato	4,971	80	15	5	0	3,977	0,746	0,249	-
baik	35,264	70	10	5	15	24,685	3,526	1,763	5,290
baik	10,041	65	15	15	5	6,527	1,506	1,506	0,502
baik	9,799	60	15	20	5	5,879	1,470	1,960	0,490
baik	15,614	70	15	10	5	10,930	2,342	1,561	0,781
rusak batung	8,170	66	15	15	4	5,392	1,226	1,226	0,327
rusak jilatang	18,050	74	12	10	4	13,364	2,167	1,806	0,722
rusak labuah	8,549	78	12	10	0	6,668	1,026	0,855	-
rusak panjang	15,923	72	15	8	5	11,465	2,388	1,274	0,796
rusak rami	25,129	60	12	18	10	15,077	3,015	4,523	2,513
rusak	488,47	66	14,35	12,03	8,16	314,30	69,28	60,93	43,96

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Luas Daerah Irrigasi berdasarkan status kewenangan Kota adalah adalah **488,470 Ha** dari 31 DI yang ada. Sedangkan luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik 66,16% (314,3 Ha), rusak ringan 14,35% (69,28 Ha), rusak sedang 12,03% (60,93 Ha) dan rusak berat 8,16% (43,96 Ha).

Tabel 2. 9
Panjang Sungai Dan Penanganan Tebing Sungai Di Kota Padang Panjang

NAMA SUNGAI	EKSISTING		PENANGANAN S/D TAHUN 2018		KET
	PANJANG (Km)	LEBAR (M')	PANJANG (M)	PERSENTASE	
Sungai Talang	6.000	5,00	565,00	9,42%	
Sungai Sibunian	8.000	3,00	390,00	4,88%	
Sungai Jirek	2.000	3,00	5,00	0,25%	
Batang Air Sikakeh	7.000	3,00	665,00	9,50%	
Batang Arau	4.000	4,00	50,00	1,25%	
Batang Air Sitabak	4.500	4,00	990,00	22,00%	
Batang Air Putih	2.000	6,00	155,00	7,75%	
Batang Air Bakarek-kerek	5.000	2,50	3.000,00	60,00%	
Parik Rumpang	5.500	2,50	5.000,00	90,91%	
Sungai Andok	1.500	3,50	0,00	0,00%	
Batang Anai	5.000	8,00	250,00	5,00%	
Jumlah	50.503,00		11.075,00	19,18%	

Sumber: Data Infrastruktur ke-PUPR dalam angka tahun 2018

2.3.3 Urusan Pekerjaan Umum; Bidang Cipta Karya

Untuk sarana dan prasarana di bidang Cipta Karya, sampai dengan akhir tahun 2017 telah terlaksana kegiatan pembangunan terutama di sektor penataan kawasan perumahan dan permukiman meliputi pembangunan IPAL.

Tabel 2. 10
Kondisi Prasarana Sanitasi Komunal Terbangun

JENIS SARANA PRASARANA	KONDISI AWAL	TAHUN (UNIT)						Total
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
IPAL Komunal				2 Unit	1 Unit	2	2	
Keterangan				- IPAL Kampung Teleng Kampung Manggis Atas	- IPAL Belakang Gudang Silaolang Atas	- IPAL Kelurahan Gumala	- IPAL Kelurahan Ekor Lubuk Atas	
				IPAL Kampung Jao Silaolang Atas				

Sumber: Dinas PUPR Kota Padang Panjang November 2018

2.3.4 Urusan Penataan Ruang dan Pertanahan

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan penyelenggaran penataan ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Urusan penataan ruang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perencanaan tata ruang suatu daerah kemudian diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Rencana tata ruang wilayah kota memuat:

1. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota
2. Rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem perkotaan diwilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota
3. Rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung kota dan kawasan budi daya kota
4. Penetapan kawasan strategis kota
5. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dan
6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disincentif serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah kota menjadi pedoman untuk:

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota
4. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antarsektor
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
6. Penataan ruang kawasan strategis kota

Dokumen penataan ruang yang telah disusun oleh Kota Padang Panjang yaitu:

1. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Tabel 2. 11

Permasalahan Konflik Pemsertifikatan Tanah Pemko Padang Panjang Yang Belum Bersertifikat

TIPOLOGI MASALAH	SEKTOR MASALAH	LOKASI (KEL DAN KEC)	LUAS (M2)	CARA PEROLEHAN (GANTI WAJAR/HIBAH/DSB) DAN TAHUN PEROLEHAN	KENDALA DALAM PENSERTIFIKATAN TANAH	PIHAK YANG TERLIBAT	UPAYA PENYELESAIAN DAN PELIBATANNYA
Pemsertifikatan Tanah Erpach	Permasalahan Kepemilikan Tanah Erpach	Kel. Tanah Hitam dan Kampung Manggis Padang Panjang Barat	± 25 Ha	Tanah Erpach	Ada dua pihak yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut	1. Pihak adat (KAN) 2. Pemda Kota Padang Panjang	Telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait

Sumber: Data Bidang Tata Ruang Tahun 2017

Tabel 2. 12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan dan sarana dan prasarana	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
2	Terlaksananya pelayanan pembuatan Advice Planring (AP) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Berkas	100	300	250	200	200	100	300	250	200	200	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penataan ruang (sosialisasi)	kali	0	10	10	2	2	0	10	10	2	2	100	100	100	100	100
4	Terlaksananya pelayanan pengadaan barang dan jasa	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
5	Terlaksananya pelayanan kebinamargaan dan pengairan	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
6	Terlaksananya pelayanan keciptakaryaan	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
7	Tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur yang berkualitas -Pembangunan gedung - RDTR	Dokumen	7 2	3 2	1 0	0 0	0 0	7 2	3 2	1 0	0 0	0	100	100	100	100	-

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARUHAN	PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN								IMPLEMENTASI DAN EVALUASI								IMPLEMENTASI DAN EVALUASI							
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8	Tersedianya infrastruktur keciptakaryaan yang berkualitas - Pembangunan drainase - Pembangunan gedung	Paket Unit	18 6	10 4	7 3	7 2	7 1	18 6	10 4	7 3	7 2	7 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Tersedianya infrastruktur kebinamargaandan pengairan yang berkualitas - Pembangunan jalan - Pembangunan irigasi - Pembangunan trotoar	Km	9,66 3,65 2,15	7 3 1,5	7 2,8 4,3	7 2,7 4,1	7 2,6 1	9,66 3,65 2,15	7 3 1,5	7 2,8 4,3	7 2,7 4,1	7 2,6 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Terlaksananya pengawasan pembangunan dan pengawasan infrastruktur	Patok / bangunan	100/ 75	100/ 75	100/ 75	100/ 75	100/ 75	100/ 75	100/ 75	100/ 75	100/ 75	100/ 75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan - Tempat sampah - Kontainer - Gerobak sampah - Becak motor - Pick up - Dump truck - Truck amroll - Eskavator	Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 5 25 16 1 2 1 1	200 5 40 0 0 2 0 0	- - - - - - - - -	0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 5 25 16 1 2 1 0	200 5 40 0 0 2 2 0	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	100	100	100	-	-	-	-	-	-							

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR TAHUN					REALISASI DAN PENCAPAIAN ALAT ALIR					PERSENTASE CAPAIAN PADA TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
12	Terlaksananya operasional kebersihan kota dan perlindungan sarana dan prasarana persampahan	Tahun	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	100	100	100	-	-
13	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang fungsional dan estetik.	Lokasi	2	1	1	1	1	2	1	1	1	100	100	100	100	100	
14	Terselenggaranya sosialisasi 3R (Reuse, Reduce, Recycle)	Kelurahan/ Sekolah	0/0	16/3 9	0/34	0	0	0/0	16/3 9	0/34	0	100	100	100	-	-	

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEOMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.4.1 Tantangan

Tantangan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang ke depan adalah :

- a. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Padang Panjang baik pembangunan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan harus memperhatikan lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan).
- b. Pembangunan yang akan dilakukan akan mengurangi lahan produktif pertanian.

2.4.2 Peluang

- a. Adanya dukungan dana dan pengembangan SDM aparatur dibidang pekerjaan umum dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.
- b. Komitmen pimpinan yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

RAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen

Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kurun waktu Tahun 2018-2023.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang menghadapi beberapa permasalahan dan kendala dalam mewujudkan serta melaksanakan program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sebagai berikut:

1. Kualitas, kuantitas dan komitmen sumber daya aparatur masih belum optimal dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan teknis maupun penguasaan informasi teknologi serta kesadaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Jumlah sarana prasarana penunjang kerja belum mencukupi dan ketersediaan data teknis untuk kebutuhan perencanaan yang belum memadai seperti;
 - a. kendaraan operasional lapangan yang masih kurang memadai,
 - b. Sistem data base penataan ruang, pertanahan dan infrastruktur lainnya seperti data base trotoar, data base drainase yang belum lengkap,
3. Standar Pelayanan Publik (SPP) yang masih kurang dalam pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat ;
4. Rendahnya kemampuan fiskal Daerah dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembentukan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

5. Tenaga Pengawas yang berkualifikasi dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan di lapangan belum memadai baik dari kuantitas maupun kualitas;
6. Masih rendahnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan.
7. Belum lengkapnya ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Masih banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
9. Masih rendahnya pelaksanaan sosialisasi di bidang penataan ruang kepada stakeholder dan pemangku kepentingan pembangunan.
10. Belum tersedianya sistem informasi penataan ruang yang dapat diakses publik.
11. Belum terpenuhinya debit air untuk kebutuhan irigasi.
12. Belum terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air untuk mendukung keberlanjutan penyediaan air, dan pengendalian daya rusak air.
13. Masih kurangnya kualitas dan kapasitas jalan.
14. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang jalan.
15. Belum terpenuhinya target pelayanan air minum untuk seluruh masyarakat.
16. Belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur kota.
17. Rendahnya legalisasi terhadap kepemilikan asset tanah Pemerintah Kota.
18. Belum terintegrasinya penataan ruang dan pertanahan dalam proses penyusunan dokumen rencana tata ruang.
19. Belum tersedianya lahan untuk pembangunan jalan dan kantor serta RTH.
20. Masih ada tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat.
21. Adanya keterbatasan ruang sebagai fungsi ekologi, rekreasi dan bermain serta estetika kota yang menyebabkan rendahnya rasio RTH
22. Belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan jaringan irigasi dan sungai di kota Padang Panjang.
23. Belum maksimalnya layanan jalan dan sarana pendukung jalan seperti trotoar dan drainase.

24. Belum tuntasnya proyek-proyek strategis kota dalam mendukung kegiatan perekonomian, sosial budaya dan pendidikan masyarakat.seperti Pasar dan Islamic Centre.

25. Belum tercapainya target program ketersediaan 100% air minum, angka 0% kawasan kumuh dan 100% fasilitas sanitasi yang seharusnya berakhir di tahun 2019

26. Wilayah Padang Panjang belum terlayani secara maksimal terhadap akses penerangan jalan umum

27. Masih terbatasnya jumlah tukang yang memiliki sertifikasi di kota Padang Panjang sesuai dengan amanat UU RI No. 2 Tahun 2018 tentang jasa konstruksi baik proyek pemerintah maupun swasta wajib bersertifikasi.

Dari beberapa permasalahan diatas, maka yang menjadi permasalahan utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah **Belum Optimalnya Kualitas Infrastruktur Dasar di Kota Padang Panjang**, yang disebabkan oleh :

1. Masih rendahnya ketersediaan dokumen perencanaan penataan ruang.
2. Belum optimalnya Pengendalian Tata Ruang disebabkan oleh masih rendahnya ketaatan masyarakat dan lemahnya penegakan hukum.
3. Belum terpenuhinya ketersediaan sarana prasarana sumber daya air untuk mendukung keberlanjutan penyediaan air, dan pengendalian daya rusak sungai.
4. Belum terpenuhinya pelayanan infrastruktur dasar berupa kondisi ketersediaan sarana dan prasarana (kuantitas, kualitas, fungsional) mengacu pada Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang SPM ke-PU-an.
5. Belum terpenuhinya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan infrastruktur dasar.
6. Masih rendahnya kepastian hukum asset tanah dari persentase luas lahan bersertifikat dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

3.2 TELAAH VISION, MISI, DAN PROGRAM WALIKOTA PADANG PANJANG

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dirumuskan sebagai berikut:**“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan Bermatabat.** Untuk mewujudkan visi tersebut disusunlah Misi 4 Pilar yang

kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut:

1. Ekonomi

(Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis pembangunan Berkelaanjutan)

2. Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Kesehatan

(Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya)

3. Pelayanan Umum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota

(Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan partisipatif)

Program pembangunan prioritas Walikota yang telah disampaikan kepada masyarakat sebagai janji politik dalam Penilukada yang lalu antara lain:

1. Mewujudkan penataan kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan;
2. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan kelancaran konektivitas dalam dan antar daerah
4. Menjaga kualitas lingkungan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sebagai dinas teknis yang terkait dengan perwujudan visi, misi dan program pembangunan prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab (bersama Perangkat Daerah terkait lainnya), untuk mewujudkan misi ke-1 yaitu “Ekonomi” (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis pembangunan Berkelaanjutan).

Bahwa misi Walikota untuk meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan, sejalan dengan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2018 – 2023 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diembat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Perierintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja,amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna mengerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua’;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI.

Faktor utama yang dapat menjadi penghambat di dalam pencapaian visi, misi dan program pembangunan prioritas adalah faktor rendahnya kemampuan fiskal daerah dan minimnya anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, namun demikian dengan strategi pelibatan seluruh stake holder pembangunan yaitu pemerintah (Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota), pihak swasta dan masyarakat, faktor penghambat tersebut diharapkan dapat diselesaikan.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 - 2019.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah: "**Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**". Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan

sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua;

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Muatan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan	1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan; 2. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran; 3. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk	1. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi;

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Meningkatkan ketahanan air, dan pengelolaan energi, guna mendukung ekonomi domestik dalam skala mandirian ekonomi	2. Meningkatnya ketahanan air dan pengelolaan energi, guna mendukung ekonomi domestik dalam skala mandirian ekonomi
Mengelenggaran pembangunan yang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk meningkatkan produktivitas, konsensi, dan pelayanan sistem satik nasional bagi penguatan saing bangsa di lingkup obel yang berfokus pada perpaduan konektivitas daratan maritim	<p>1. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing;</p> <p>2. Meningkatnya kemantapan jalan nasional;</p> <p>3. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas;</p> <p>4. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan.</p>
Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur lahar yang layak guna dewajudkankualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua"	<p>1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;</p> <p>2. Meningkatnya penyediaan dan pembentukan perumahan.</p> <p>1. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas;</p> <p>2. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;</p> <p>3. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan prasarana informasi publik, serta sarana dan akuntabel.</p>

3.4 TELAAHAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROPINSI SUMATERA BARAT

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam meyelenggarakan pemerintahan lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan tata pemerintahan Dinas PU/PUPR yang baik, bersih, dan profesional
- b) Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah
- c) Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan

Adapun sasaran yang perlu dicapai demi tercapainya tujuan tersebut antara lain :

- a) Meningkatnya tata kelola organisasi

Adapun tata kelola organisasi Dinas PU/PUPR mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi.

- b) Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah

Salah satu indikator dalam tercapainya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah meningkatnya kemantapan jalan. Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

DINAS PUPR PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
				1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan tata pemerintahan Dinas PUPR yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	A	A
			Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	95%	96%	97%	97%	98%	98%
2	Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya koneksi dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	70%	71%	72%	73%	74%	75%
		Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	5 unit	8 unit	8 unit	3 unit	5 unit	3 unit
			Persentase cakupan air minum	69%	70%	75%	80%	83%	86%
			Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	72%	73%	75%	78%	79%	80%
3	Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuensi berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang	80%	81%	82%	83%	84%	86%

3.5 TELAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

3.5.1 Struktur Ruang

Agar pengembangan pemanfaatan ruang kota sesuai dengan arah pengembangan kota yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah, maka di setiap pusat kegiatan baik pusat utama maupun subpusat perlu dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan terciptanya keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antarwilayah pengembangan kota. Pengembangan pemanfaatan ruang kota (pusat atau sub-pusat) dilaksanakan dengan mengacu pada 2 (dua) kriteria, yaitu:

1. Pusat kegiatan yang dikembangkan atau didorong pertumbuhannya dan
2. Pusat kegiatan yang dikendalikan atau dibatasi pertumbuhannya.

Pusat kegiatan yang dikembangkan adalah pusat baru di masing-masing subpusat pengembangan kota yang pengembangannya diprioritaskan dalam 5 (lima) tahun kedua RTRW (2017-2022), sedangkan pusat kegiatan yang dikendalikan adalah inti pusat kota. Pengembangan infrastruktur diarahkan pada pengembangan jaringan jalan, pengembangan fasilitas umum dan sosial, pengembangan sarana transportasi; pengembangan prasarana sumber daya air, irigasi dan drainase; pengembangan prasarana energi dan telekomunikasi serta pengembangan prasarana persampahan, limbah B3 dan pemadam kebakaran merupakan prioritas pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedua RTRW (2017-2022).

3.5.2 Pola Ruang

Arah Pengembangan pemanfaatan ruang kota yang tertuang dalam dokumen RTRW Kota Padang Panjang diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori yaitu: kawasan lindung dan pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan kawasan yang didalamnya tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali pembangunan prasarana vital dengan luas areal maksimum 2% dari luas kawasan lindung. Di dalam kawasan non hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan kegiatan budidaya secara terbatas dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan seerta wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap

lingkungan hidup.Kegiatan budidaya yang sudah ada di Kawasan Lindung dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta dapat mengganggu fungsi lindung, maka fungsi sebagai Kawasan Lindung dikembalikan secara bertahap disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan memperhatikan fungsi lindung, kawasan yang bersangkutan, dapat dilakukan eksplorasi mineral dan air tanah serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam. Untuk kawasan budidaya, peruntukan pemanfaatan ruangnya meliputi : (a) pengembangan kawasan perumahan, (b) kawasan perdagangan dan jasa, (c) kawasan pemerintahan dan bangunan umum, (d) kawasan perindustrian dan pergudangan, (e) kawasan pariwisata, kawasan pertanian dan (f) peternakan, kawasan pendidikan.

3.5.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Pengelolaan Lahan Perkotaan

Status kepemilikan lahan di Kota Padang Panjang secara umum berupa Tanah Ulayat, yang sangat sensitif terhadap pembebasan lahan, dimana memerlukan prosedural panjang dan waktu yang lama untuk kebutuhan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan.

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan sarana prasarana perkotaan harus memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup, dalam arti kata harus memperhatikan 2 (dua) hal yakni : (1)Keseimbangan lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan lahan dan (2)Kelestarian lingkungan, berkaitan dengan budidaya peternakan ayam ras yang berada pada pusat-pusat permukiman penduduk.

3. Pembangunan Prasarana Sarana Perkotaan.

Agar pembangunan sarana prasarana perkotaan dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, maka dalam pembangunan sarana prasarana yang dimaksud meski memperhatikan beberapa hal yakni: (1) Kondisi ketersediaan prasarana dan sarana baik secara kuantitas, kualitas dan fungsionalnya, (2) Gap (ketimpangan/kesenjangan) antara kebutuhan dan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan, sehingga dibutuhkan upaya optimasi dalam pembangunan prasarana dan sarana perkotaan, yang menimbulkan ketimpangan pembangunan antar kawasan dan (3) Agar Pembangunan jalan lingkar

utara yang diperuntukan sebagai sentra pertumbuhan perdagangan dan industri Kota Padang Panjang dan peningkatan fungsi jalan lingkar selatan.

4. Pembangunan sektor dan kawasan strategis.

Pelaksanaan pembangunan untuk berbagai sektor yang direncanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan prioritas dan ketersediaan anggaran. Penetapan urutan prioritas pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui proses pengenalan potensi dan persoalan-persoalan strategis, sektor-sektor strategis dan kawasan-kawasan strategis.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menghambat dan mendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang yang ditinjau atas implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Padang Panjang. Adapun faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain:

- a. Pertumbuhan untuk kawasan perumahan dan perkantoran menyebabkan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur meningkat. Pertumbuhan kawasan tersebut sering tidak didukung ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak dan memadai.
- b. Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur sering terkendala keterbatasan lahan yang ada, dan waktu yang lama untuk proses pengadaan lahan yang terhambat oleh status kepemilikan tanah oleh ulayat dan harga ganti rugi lahan yang tinggi.

2. Faktor Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain:

- a. Pembagian wilayah berdasarkan atas struktur ruang menjadi potensi besar dalam pengembangan wilayah Kota Padang Panjang menjadi lebih merata dan tidak terpusat pada satu wilayah tertentu saja;
- b. Kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur dilakukan dengan penetapan prioritas pembangunan melalui proses

pengenalan persoalan-persoalan strategis, sektor-sektor strategis dan kawasan-kawasan strategis sesuai dengan tingkat urgensi/kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

3.6.1 Metode Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu strategis menceminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan dalam organisasi, komunitas yang dilayani atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata pada organisasi dan/ atau komunitas yang dilayani" (Martinelli 1999). Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah di Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan. Situasi dan kondisi lingkungan eksternal dan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menjadi isu strategis. Perumusan isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang perlu memperhatikan beberapa hal antara lain adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur terkait pembangunan di semua sektor sebagaimana amanat RPJMN 2015-2019;
2. Pemenuhan kebutuhan pembangunan bidang air minum dan sanitasi harus mencapai akses 100-0-100 di Tahun 2019;
3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014;
4. Sustainable Development Goals (SDG's), khususnya tujuan dan target air bersih dan sanitasi;
5. Pelimpahan urusan pemerintah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi urusan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI 2015-2019;

7. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
8. Pencapaian Kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdahulu.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting daya Tarik suatu kawasan/ wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat. Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing daerah, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi dunia usaha.

3.6.2 Isu-isu Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan hasil rumusan faktor-faktor yang mendukung (peluang dan potensi) maupun yang menghambat (kelemahan dan tantangan), maka dirumuskanlah isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima;
2. Pemenuhan ketersediaan sarana prasarana sumber daya air untuk mendukung keberlanjutan penyediaan air, kedaulatan pangan, guna mengerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Pelayanan infrastruktur dasar berupa kondisi ketersediaan prasarana dan sarana (kuantitas, kualitas, fungsional) sebagai amaranat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik sarana dan prasarana jalan, jembatan, irigasi, sungai, sanitasi, air bersih.
4. Rendahnya kualitas perencanaan penataan ruang dan penataan bangunan gedung yang disebabkan oleh masih rendahnya masyarakat yang mengurus Izin Mendirikan Bangunan.
5. Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal dilihat dari jumlah pengurusan izin pemanfaatan ruang yang di keluarkan.

- Pengendalian Tata Ruang yang belum optimal yang disebabkan oleh masih rendahnya ketataan terhadap RTRW dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran penataan ruang.
- Sulitnya melakukan penyelesaian masalah pertanahan dilihat dari Persentase luas lahan bersertifikat dan Penyelesaian konflik tanah Negara.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

Tujuan	: Terwujudnya Penataan Kota Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang, dan Pemenuhan Infrastruktur Yang Berkualitas dan berwawasan lingkungan
Sasaran	:
Strategis 1	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya infrastruktur dasar publik yang sesuai standar daerah.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image kota, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan tujuan dan sasaran strategis dinas didasarkan pada faktor kunci keberhasilan.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan kinerja keberhasilan dinas, sehingga dengan memperhatikan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pertanahan yang menjadi kewenangannya, maka tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan**.

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan diformulasikan sebagai sasaran strategis dinas. Adapun sasaran strategis yang akan dituju yaitu;

1. Meningkatnya Infrastruktur Dasar publik yang sesuai standar.
2. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang.

Rumusan tujuan dan sasaran dan indikator penilaian ketercapaiannya digambarkan pada Tabel 4.1

**Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	KINERJA TAHUN 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Infrastruktur dan Sosial	1. Meningkatnya Infrastruktur dan Sosial	Percentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	na	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50
Meningkatnya Infrastruktur Dasar publik yang sesuai standar	1. Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik	60%	65,14%	71,17%	77,5%	89,17%	95,5%	
	2. Persentase Rumah Tinggal dengan	77,06%	79%	80%	81%	82%	83%	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	KINERJA TAHUN 2017					TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN		
			2019	2020	2021	2022	2023			
		3. Proporsi Rumah tangga dengan Akses berkelanjutan terhadap air minum layak	91,09%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang		4. Indeks Penilaian Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	Na	2,7	2,8	2,9	3,0	3,0		

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kota Padang Panjang merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2018-2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengupayakan mendorong terwujudnya optimalisasi penataan ruang dan pembangunan sarana infrastruktur yang handal dengan melibatkan pemangku kepentingan secara menyeluruh dan berkesinam-bungan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pejaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018-2023 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Padang Panjang. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) dengan hasil sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

- a. Kekuatan/ Strength (S)
 - 1. Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah
 - 2. Tingkat disiplin pegawai yang cukup tinggi

- 3. Pengendalian Internal yang sistematis
- 4. Konsep Perencanaan teknis yang baik

b. Kelemahan / Weakness (W)

- 1. Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
- 2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan.
- 3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Sumber Daya Air.
- 4. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar publik (Jalan, irigasi, Air Minum, Drainase) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- 5. Masih rendahnya kepastian hukum aset tanah pemerintah Kota Padang Panjang

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang/ Opportunities (O)

- 1. Komitmen Pimpinan Daerah
- 2. Komitmen DPRD Kota Padang Panjang
- 3. Adanya penyedia jasa yang profesional dibidangnya.
- 4. Dukungan dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Lembaga terkait lainnya
- 5. Kondisi Alam / Lingkungan yang mendukung

b. Ancaman/ Threats (T)

- 1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi pemanfaatan ruang dan kebutuhan infrastruktur yang telah ada.
- 2. Masih kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam mentaati dokumen Rencana Tata Ruang.
- 3. Masih banyaknya kepemilikan tanah yang berstatus tanah ulayat/kaum/PT.KAI/TNI.
- 4. Bencana Alam.

Berdasarkan analisa atau kajian terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) diatas maka dirumuskan strategi dan arah kejadian seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 1

Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur dasar publik yang sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja jaringan jalan jembatan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung 3. Melaksanakan updating kondisi jalan dan jembatan 4. Melaksanakan evaluasi daerah irigasi dengan kondisi baik 5. Meningkatkan kinerja layanan irigasi 6. Meningkatkan kapasitas pengelola SDA 7. Optimalisasi panjang tebing sungai yang tertata 8. Meningkatkan cakupan layanan air minum aman dengan sistem perpipaan 9. Meningkatkan pelayanan jaringan drainase drainase kawasan perkotaan 10. Meningkatkan kualitas bangunan gedung pemerintah 11. Meningkatkan ketersediaan informasi jasa konstruksi 12. Meningkatkan kualitas layanan perizinan jasa konstruksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan 2. Meningkatkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik 1. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan nyaman dan ramah disabilitas 2. Mengembangkan trotoar yang nyaman dan ramah disabilitas 3. Meningkatkan RTH yang berbasis digital 4. Pelaksanaan survey kondisi dan pemutakhiran data jalan dan jembatan 5. Meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik 6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi 7. Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan perairan lainnya 8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA 9. Meningkatkan penataan sungai 10. Peningkatan kualitas tebing sungai 11. Penambahan jaringan air minum 12. Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum 13. Peningkatan penyediaan jaringan drainase kota 14. Meningkatkan persentase jalan kota yang memiliki drainase 15. Penataan bangunan dan lingkungan 16. Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum perkotaan 17. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi 18. Tersedianya layanan IUJK yang sesuai dengan SOP

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang			
	1. Melengkapi dokumen perencanaan tata ruang	1. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang	
	2. Melakukan sosialisasi dokumen perencanaan tata ruang yang sudah ada	2. Pelaksanaan sosialisasi dokumen perencanaan tata ruang	
	3. Menerbitkan Keterangan Rencana Kota sesuai dokumen perencanaan	3. Meningkatkan kepatuhan pembangunan sesuai dokumen tata ruang	
	4. Menerbitkan rekomendasi izin pemanfaatan ruang	4. Penerbitan Keterangan Rencana Kota sesuai dokumen perencanaan	
	5. Melakukan penataan bangunan dan lingkungan	5. Penerbitan Rekomendasi IMB Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang	
	6. Melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	6. Meningkatkan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan IMB 7. Pelaksanaan penataan ruang	
	8. Melakukan penataan bangunan dan lingkungan	8. Pembinaan tata bangunan dan lingkungan	
	9. Melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	9. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	
	10. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan penataan ruang	10. Peningkatan kompetensi aparatur penyelenggaraan penataan ruang	
	11. Menyediakan sistem informasi penataan ruang	11. Penyediaan sistem informasi penataan ruang berbasis Web-GIS	
	12. Menyediakan data base asset tanah	12. Penyediaan data base tanah asset Pemko	
	13. Melaksanakan sertifikasi tanah asset	13. Pelaksanaan sertifikasi tanah asset Pemko	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran atau tujuan. Program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang pada satu atau lebih unit kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program denganmengerahkan sumber daya (sumber daya manusia), peralatan, teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sedangkan indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Padang Panjang yaitu :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3. Penyediaan Jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan makanan dan minuman
8. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
4. Pengadaan Kendaraan Roda Dua
5. Pengadaan Kendaraan Roda Empat
6. penyusunan DED Pembangunan Kantor Dinas PUPR
7. pembangunan gedung kantor Dinas PUPR

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan:

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan laporan kinerja keuangan Perangkat Daerah
2. Penyusunan perencanaan Pelaporan Kinerja Perangkat daerah
3. Penyusunan buku analisa harga satuan pekerjaan dinas pekerjaan umum

VI. Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana publik, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin/berkala prasarana umum
2. Pembangunan sarana dan prasarana ibadah
3. Pembangunan gedung sosial budaya
4. Pembangunan gedung wisma
5. Pembangunan convention hall
6. Pekerjaan Lanscape
7. Pembangunan Sarana prasarana Pasar
8. Pembangunan retaining wall
9. Penyusunan DED Gedung Parkir

VII. Program Pembinaan Jasa Kontruksi, dengan kegiatan:

1. Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Kontruksi
2. Pembinaan Kompetensi dan Produktifitas Konstruksi
3. Pembinaan Tertib Penyeleggaraan Konstruksi
4. Penyusunan Database Drainase dan trotoar

VIII. Program Pembangunan jalan dan jembatan, dengan kegiatan:

1. Pembangunan Jalan

IX. Program Peningkatan jalan dan jembatan, dengan kegiatan:

1. Peningkatan Jalan

X. Program pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar, dengan kegiatan:

1. Pembuatan DED Pendistrian
2. Pembangunan Trotoar
3. Rehabilitasi Trotoar

XI. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, dengan

kegiatan:

1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong
2. Pemeliharaan Periodik Jalan Dalam Kota
3. Pemeliharaan rutin berkala trotoar
4. Pemeliharaan rutin jalan dalam kota
5. Penunjang DAK Infrastruktur jalan
6. Pengadaan alat kebinamargaan (mesin backhoe loader , Dump Truck, Stamper, breaker)
7. Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Pick Up)
8. Pengadaan Genset
9. Kajian potensi pelebaran jalan
10. DAK Bidang Jalan

XII. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan Periodik Jalan Dalam Kota
2. Pemeliharaan rutin berkala trotoar
3. Pemeliharaan rutin jalan dalam kota
4. Penunjang DAK Infrastruktur jalan

XIII. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan :

1. Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi
2. Penunjang DAK Infrastruktur Irigasi
3. DAK Bidang Irigasi

XIV. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, dengan kegiatan:

1. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
2. Pembangunan Pengaman Sungai

XV. Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan kegiatan:

- Penambahan Jaringan Tiang dan Lampu Jalan dalam Kota Pemeliharaan Jaringan Tiang dan Lampu Jalan dalam Kota

X. Program pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar, dengan kegiatan:

1. Pembuatan DED Pendistrian
2. Pembangunan Trotoar
3. Rehabilitasi Trotoar

XI. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, dengan kegiatan:

1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong

XII. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan Periodik Jalan Dalam Kota
2. Pemeliharaan rutin berkala trotoar
3. Pemeliharaan rutin jalan dalam kota
4. Penunjang DAK Infrastruktur jalan
5. Penunjang DAK Infrastruktur jalan (Pemeliharaan Periodik)
6. Pengadaan alat kebinamargaan (mesin backhoe loader , Dump Truck, Stamper, breaker)
7. Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Pick Up)
8. Pengadaan Genset
9. Kajian potensi pelebaran jalan
10. DAK Bidang Jalan

XIII. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan :

1. Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi
2. Penunjang DAK Infrastruktur Irigasi
3. DAK Bidang Irigasi

XIV. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, dengan kegiatan:

1. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
2. Pembangunan Pengaman Sungai

XV. Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan kegiatan:

- Penambahan Jaringan Tiang dan Lampu Jalan dalam Kota Pemeliharaan Jaringan Tiang dan Lampu Jalan dalam Kota

XVI. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan kegiatan:

1. Penataan RTH
2. Pemelibaraan RTH
3. Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)
4. Revisi Masterplan RTH
5. Perencanaan Pembangunan/ Pengembangan Taman Kota

XVII. Program Bangunan Air Kotor Perkotaan, dengan kegiatan :
Bangunan Pembuangan Air Kotor

XVIII. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan kegiatan:

1. Dana Penunjang Operasional (DAK Infrastruktur Air Minum dn Air Limbah)
2. DAK Infrastruktur Air Bersih
3. DAK Sanitasi Air Limbah

XIX. Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan :

1. Pembinaan Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung
2. Rapat koordinasi tentang perencanaan tata ruang
3. Revisi Perda RTRW
4. Survey dan Pemetaan
5. Perubahan Sertifikat Tanah Masyarakat yang Terkena Fasum
6. Pematokan tanah yang telah diserahkan masyarakat untuk fasum
7. Entry Plotting Data Advice Planning dan IMB
8. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

XX. Program Penataan Penguasaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan:

1. Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas PU/PUPR
2. Pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar Selatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023 secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1 (terlampir).

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG

Indikator kinerja Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagaimana berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2019	2020	2021	2022	
INDIKATOR TUJUAN								
1.	Persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	na	0,50%	0,75%	1,00%	1,25%	1,50%	1,5%
INDIKATOR SASARAN								
1.	Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik	Na	46,3 %	51,4%	58,9%	65,3%	71,09%	71,09%
2.	Indeks Penilaian Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	Na	2,7	2,8	2,9	3,0	3,0	3,0
INDIKATOR PROGRAM								
6.	Persentase Ketersediaan Sarana publik	0%	20%	40%	70%	88%	100%	100%
7.	Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat	na	27%	44%	61%	81%	100%	100%
8.	Persentase jalan dalam kondisi baik	88,41%	90,50	91,50%	92,50	93,50	94,50%	94,50%
9.	Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas	0%	17%	33%	50%	83%	100%	100%
10.	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	87,86%	88%	89%	90%	91%	92%	92%
11.	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	61%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
12.	Persentase panjang sungai yang dikonservasi	3	3	3	3	3	3	3

13. Persentase Penerangan Jalan Umum (Pemasangan PJU setiap 50 m dibagi panjang jalan lingkungan dan jalan kota)	61,64%	71%	75%	80%	85%	90%	90%
14. Cakupan Pelayanan Air limbah	77,06	79%	80%	81%	82%	83%	83%
15. Cakupan Pelayanan Air minum	91,09	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16. Persentase RTH Publik	2,46%	2,6%	2,7%	2,8%	2,9%	3,0%	3,0%
17. Rasio Bangunan BerlMB per Satuan bangunan	3816/88	4035/69	4135/9	4230/206	4320/9307	4405/949401	4405/9488

Keterangan:

Definisi Operasional Indikator Sasaran dan Program

NO	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
	SASARAN		
	Meningkatnya Infrastruktur publik yang standar sesuai.	1. Persentase sarana infrastruktur dasar dalam kondisi baik	Rata-rata persentase sarana publik yang dibangun dalam kondisi baik. Pembangunan Jalan,Irigasi,drainase,Trotoar,Banjir,Rambu lalu lintas, Sanitasi,PJU yang dibangun atau direhab/Rata-rata persentase sarana publik yang dibangun dalam kondisi baik.
	Meningkatnya kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang	2. Pemakaian Ruang yang sesuai dengan Tata Ruang	Penilaian persentase ruang yang dibangun dalam kondisi baik. Persentase ruang yang dibangun dalam kondisi baik yang sesuai dengan perencanaan tata ruang.
	PROGRAM		
	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana publik	Persentase Ketersediaan Sarana publik	Jumlah sarana publik yang dibangun/Jumlah kebutuhan sarana publik x 100%
	Program Perencanaan dan Pembinaan Kontruksi	Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikat	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat/Total seluruh Tenaga Kerja Konstruksi x 100%
	Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi jalan dan Jembatan	Persentase dalam kondisi baik jalan	Panjang jalan dalam kondisi baik/Total keseluruhan panjang jalan x 100%
	Program pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas	Panjang trotoar jalur utama yang ramah disabilitas/Panjang kesekuruan trotoar x 100%
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Panjang Drainase dalam kondisi baik/Panjang drainase x 100%

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM	DIFINISI OPERASIONAL
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya jalan dan jembatan	Panjang jalan dan jumlah jembatan yang dipelihara/ Panjang jalan dan jumlah jembatan yang seharusnya dipelihara x 100%
	Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	Luas irigasi Kota dalam kondisi baik/Luas irigasi Kota x 100%
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai	Persentase panjang sungai yang dikonservasi	Panjang sungai yang dikonservasi/Panjang keseluruhan sungai yang harus dikonservasi x 100%
	Program Penerangan jalan Umum	Persentase Penerangan Umum (Pemasangan PJU setiap 50 m dibagi panjang jalan lingkungan dan jalan kota)	Jumlah Pemasangan PJU/Total Kebutuhan pemasangan PJU x 100%
	Program Bangunan Air Kotor Perkotaan	Panjang bangunan air kotor yang dibangun	Panjang bangunan air kotor yang dibangun/Total rencana pembangunan air kotor x 100%
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Pelayanan Air limbah	Jumlah Sarana pelayanan air limbah yang dibangun/Total keseluruhan kebutuhan sarana pelayanan air limbah x 100%
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kota	Luasan RTH Publik tersedia/Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia x 100
	Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio BerIMB per Satuan bangunan	Jumlah Bangunan ber IMB /Jumlah bangunan

BAB VIII PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyadari bahwa tidak mampu untuk berkarya sendiri tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Sebagai bagian dari proses pembangunan daerah itu sendiri, INOVATOR PEMBANGUNAN CERDAS tetap menjadi semangat dasar dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dalam melakukan karyanya, dengan Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Pertanahan, serta Bina Program, Perencanaan dan Jasa Konstruksi menjadi fokus dari target pembangunan yang menjadi kewenangan. Keberlanjutan program di masyarakat menjadi kondisi yang harus diupayakan dalam setiap program yang dilaksanakan.

Untuk itu, Besar harapan kami agar Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara real dan idealnya dapat menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga Dokumen Perencanaan ini menjadi bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang menuju terwujudnya pelayanan prima di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Mei 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Nip. 196307271992231004

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGI (RENSTRAL)

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018-2023**

TAUJAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/UJUJAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/PENDANAAN								PONDASI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENOVASI/PERANOKAT DARIH	LOKASI						
					2019				2020				2021		2022		2023			
					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)		
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					60.781.223.700		62.792.286.957		60.364.330.305		70.820.549.710		88.657.778.998		343.416.169.669	KOTA PDG. PANJANG				
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur BerkelaJutan			Persentase kerenakan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	na	0,5		0,75		1		1,25		1,5		1,5					
Meningkatnya Infrastruktur Dasar publik yang sesuai standar			1. Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik	60,00%	65,17		71,17%		77,50%		89,17%		95,50%		94,50%					
			3. Persentase Rumah Tinggal dengan bersanitasi Layak	77,00%	79%		80%		81%		82%		83%		83%					
			5. Proporsi Rumah tangga dengan Akses berkelaJutan terhadap air minum layak	91,09%	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
	BELANJA LANGSUNG				60.781.223.700		62.792.286.957		60.364.330.305		70.820.549.710		88.657.778.998		343.416.169.669	KOTA PDG. PANJANG				
OK	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan prasarana publik		Persentase Keferdilauan Sarana publik	-0%	-20%	11.811.650.000	40%	3.860.000.000	70%	15.400.000.000	86%	23.220.680.840	100%	23.021.934.092	100%	77.054.274.742	KOTA PDG. PANJANG			
	Pemeliharaan rutin/berkala prasarana umum		Jumlah sarana umum yang dipelihara		1 tahun	400.000.000	1 tahun	400.000.000	1 tahun	400.000.000	1 tahun	400.000.000	1 tahun	400.000.000	5 tahun	2.000.000.000	KOTA PDG. PANJANG			
	Pembangunan sarana dan prasarana ibadah yang dibangun		Jumlah sarana dan prasarana ibadah yang dibangun		1 unit (lanjutan)	5.281.680.000	1 unit								1 unit	5.281.680.000	KOTA PDG. PANJANG			
	Pembangunan Gedung Pertemuan		Jumlah gedung pertemuan yang dibangun											1 unit (convention hall)			23.621.934.052,00	1 unit	23.621.934.052,00	KOTA PDG. PANJANG
	Penataan Landscape		Jumlah landscape yang ditata												1 paket	5.450.000.000	KOTA PDG. PANJANG			
	Pembangunan Sarana prasarana Pasar		Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan		1 paket	4.950.000.000	1 paket (1 lft)	1.500.000.000								1 unit	800.000.000	KOTA PDG. PANJANG		
	Pembangunan retaining wall Rusunawa		Lanjutan Pembangunan Rataining Wall Rusunawa		1 unit	800.000.000										1 unit				
	Penyusunan DED Gedung Parkir		Tersusunnya dokumen DED Gedung Parkir		1 dokumen	400.000.000		0		0		0		0	1 dokumen	400.000.000	KOTA PDG. PANJANG			
	Pembangunan Gedung Parkir		Jumlah Gedung Parkir yang dibangun						1 unit	15.000.000.000	1 unit	15.000.000.000			1 unit	30.000.000.000		0	KOTA PDG. PANJANG	
	Rehab Lapangan Anas Karim		Jumlah sarana yang direhab															0	KOTA PDG. PANJANG	
	Rehab Gerbang Batas Kota Sialang Bawah		Jumlah gerbang yang direhab														20.000.000		KOTA PDG. PANJANG	
	Penyusunan Dokumen Izin Lingkungan		Jumlah dokumen izin lingkungan yang disusun			1 dokumen	20.000.000									1 unit	1.480.000.000		KOTA PDG. PANJANG	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum		Rehab Lapangan Anas Karim			1 Unit	1.480.000.000									1 unit				
	Rehab Gerbang Batas Kota Sialang Bawah					1 Unit														
			Jumlah landscape yang ditata					1 lokasi (Tugu Kopel)	200.000.000			1 unit (Landscape Islamic Centre)				1 unit	8.020.660.680		KOTA PDG. PANJANG	
	Program Perencanaan dan Pembinaan Jasa Kontruksi		Proporsi Tenaga kerja Konstruksi yang bersertifikat	27%	318.135.000	44%	647.917.025	61%	405.762.630	81%	419.130.190	100%	432.831.534	100%	2.263.776.379	KOTA PDG. PANJANG				
	Pembinaan Keterbukaan dan Sumber Daya Kontruksi		Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan dalam hal pelaksanaan kegiatan serta terpenuhinya teritip penyelenggaraan jasa kontruksi	1 kali	14.550.000												14.550.000	KOTA PDG. PANJANG		
	Pembinaan Kompetensi dan Produktifitas Kontruksi		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	50 Orang	149.810.000												149.810.000	KOTA PDG. PANJANG		
	Pembinaan Teritip Penyelenggaraan Kontruksi		Jumlah penyelenggaraan sosialisasi kontruksi	5 x Sosialisasi	165.975.000												153.975.000	KOTA PDG. PANJANG		
	Penyusunan Database Drainase dan trolot						2 Dokumen	100.000.000									100.000.000	KOTA PDG. PANJANG		
	Penyusunan buku analisa harga satuan pekerjaan dinas pekerjaan umum		Jumlah Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dicetak			40 buku	65.010.000	40 buku	78.012.000	40 buku	88.463.300	40 buku	95.174.640	200 buku	324.659.940	KOTA PDG. PANJANG				
	Penyusunan Master Plan Air Limbah		Jumlah Dokumen Master Plan yang Disusun			1 dokumen	200.000.000									1 dokumen	200.000.000	KOTA PDG. PANJANG		
	Pembinaan Jasa Kontruksi		Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan dalam hal pelaksanaan kegiatan serta terpenuhinya teritip penyelenggaraan jasa kontruksi			1 kali	322.907.025	1 kali	327.750.630	1 kali	332.666.890	1 kali	337.656.894	4 kali	1.320.981.439	KOTA PDG. PANJANG				
			Jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat				50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		200 Orang					
			Jumlah penyelenggaraan sosialisasi kontruksi			5 x Sosialisasi		5 x Sosialisasi		5 x Sosialisasi		5 x Sosialisasi		20 x Sosialisasi						

DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			TARGET	(Pkt)	TARGET	(Pkt)	TARGET	(Pkt)	TARGET	(Pkt)	TARGET	(Pkt)	Diperbaiki	(Pkt)		
OK	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Pembangunan jalur dalam kondisi baik	60.781.323.700	62.792.286.997	60.364.330.305	70.820.549.719	65.657.778.998	94.416.169.669	KOTA PDG.PANJANG							
	Pembangunan Jalan	Jumlah ruas jalan yang dibangun	2 ruas (Lanjutan Pembangunan Jalan ke Kompleks Islamic Centre dan BRPSDM)	10.119.550.000	11.100.615.230	12.930.095.612	11.981.905.438	22.717.341.620	58.819.713.873	KOTA PDG.PANJANG						
	Pemeliharaan Periodik Jalan Dalam Kota	Jumlah ruas jalan dalam kota yang diperlakukan secara periodik	- 5 ruas	1.500.000.000	5 ruas	1.537.500.000	5 ruas	1.615.335.938	6.228.773.438	KOTA PDG.PANJANG						
	Pemeliharaan rutin berkala trotoar	panjang trotoar yang dipelihara	500m	400.000.000	500m	410.000.000	500m	430.756.250	1.681.805.250	KOTA PDG.PANJANG						
	Pemeliharaan rutin jalan dalam kota	panjang jalan dalam kota yang terpelihara	400m	483.650.000	400m	463.650.000	400m	463.650.000	1.854.800.000	KOTA PDG.PANJANG						
	Penunjang DAK Infrastruktur jalan	Jumlah Bidang DAK yang terlaksana	1 paket	44.900.000	1 paket	44.900.000	1 paket	44.900.000	179.800.000	KOTA PDG.PANJANG						
	Penunjang DAK Infrastruktur jalan (Pemeliharaan Periodik)	Jumlah jalan dalam kota yang terpelihara secara periodik	1 paket	46.600.000	1 paket	46.600.000	1 paket	46.600.000	186.400.000	KOTA PDG.PANJANG						
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kebencanaan	Jumlah alat berat yang diajukan	2 unit (Dump truck, stempel)	385.000.000	3 unit (kendaraan pick up, breaker, gemes)	235.000.000	5 unit	600.000.000	KOTA PDG.PANJANG							
	DAK Bidang Jalan	Jumlah paket jalan yang dibangun	2 paket	8.535.685.250	2 paket	8.962.448.513	2 paket	9.410.570.938	36.789.784.168	KOTA PDG.PANJANG						
	Pembangunan jalan wisata		1 paket (gca batu bata dan batu tajur tujuh tingkat)	200.000.000					200.000.000	KOTA PDG.PANJANG						
										KOTA PDG.PANJANG						
OK	Program pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas	0%	17%	1.729.975.000	33%	2.800.000.000	50%	2.800.000.000	83%	2.758.620.000	100%	2.800.000.000	14.888.495.000	KOTA PDG.PANJANG	
	Pembuatan DED Pedestrian	Jumlah DED Pedestrian yang disusun	1 dokumen	209.975.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	209.975.000	KOTA PDG.PANJANG		
	Pembangunan Trotoar	Jumlah ruas trotoar yang dibangun	13 ruas	2.720.000.000	2 ruas (Kawasan pasar imam bonjol, khatib sulaiman)	2.000.000.000	2 ruas (jl.Sukarno Hatta)	2.000.000.000	1 ruas (jl.M.Yamin)	1.968.520.000	2 ruas 277,7 m (jl.Jend Sudirman) dan 2940 m (J.K.H.Agus Salim)	2.000.000.000	20 ruas	10.678.520.000	KOTA PDG.PANJANG	
	Rehabilitasi Trotoar	Panjang trotoar yang drehab	750 m	800.000.000	750 m	800.000.000	750 m	800.000.000	750 m	800.000.000	750 m	800.000.000	4.000.000.000	KOTA PDG.PANJANG		
		Rehab Trotoar RT 3 Sileing Atas dari Kp. Java sampai ke Pemasakan												KOTA PDG.PANJANG		
		Rehabilitasi Trotoar RT 13 Balai Belai												KOTA PDG.PANJANG		
														KOTA PDG.PANJANG		
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase Drainses Dalam Kondisi Baik	87,86%	88%	300.000.000	89%	315.000.000	90%	330.750.000	91%	347.287.500	92%	354.651.875	92%	1.657.689.375	KOTA PDG.PANJANG
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Periode pemeliharaan drainase/gorong-gorong yang dilaksanakan	300m	300.000.000	1 tahun	315.000.000	1 tahun	330.750.000	1 tahun	347.287.500	1 tahun	364.651.875	1 tahun	1.657.689.375	KOTA PDG.PANJANG	
		Terpeliharaan jalan dan jembatan	na	1 tahun	12.398.855.000									12.398.855.000	KOTA PDG.PANJANG	
	Pemeliharaan Periodik Jalan Dalam Kota	Terlaksananya pemeliharaan periodik jalan dalam kota :	1 tahun	3.214.500.000									5 tahun	3.214.500.000	KOTA PDG.PANJANG	
		Pengaspalan Jl. Adnegoro, Jl. Khatib Sulaiman, dan Jl. Lingkar Pasar Sayur													KOTA PDG.PANJANG	
		Pengaspalan Kompleks Pasar Pusat													KOTA PDG.PANJANG	
	Pemeliharaan rutin berkala trotoar	panjang trotoar yang dipelihara	1 Tahun	400.000.000									5 tahun	400.000.000	KOTA PDG.PANJANG	
	Pemeliharaan rutin jalan dalam kota	Jumlah jalan dalam kota yang terpelihara	1 tahun	483.650.000									5 tahun	463.650.000	KOTA PDG.PANJANG	
	Penunjang DAK Infrastruktur jalan	Jumlah Bidang DAK yang terlaksana	1 paket	91.500.000											KOTA PDG.PANJANG	
	Penunjang DAK Infrastruktur jalan (Pemeliharaan Periodik)	Jumlah jalan dalam kota yang terpelihara secara periodik	1 paket												KOTA PDG.PANJANG	

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			IMPRESI		UPAYA		IMPLEMENTASI		TARGET		UPAYA		IMPLEMENTASI		TARGET		UPAYA		IMPLEMENTASI		TARGET	
OK	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi jalan dalam kondisi baik	80,41%	90,50%	10.119.850.000	B1,50%	11.190.618.280	0,2,50%	12.630.095.612	93,50%	11.991.000.412	94,50%	12.711.341.572	94,50%	12.657.778.988	94,50%	12.416.152.000	94,50%	12.416.152.000	KOTA PDG.PANJANG		
	Pembangunan Jalan	Jumlah ruas jalan yang dibangun	2 ruas (Lanjutan Pembangunan Jalan ke Komplek Islamic Centre dan BKPSDM)	10.119.550.000			1 ruas (Lubuk Mata Kucing)	1.000.000.000			1 ruas (jalan Lingkar Selatan)	10.000.000.000	3 ruas	21.119.550.000	KOTA PDG.PANJANG							
	Pemeliharaan Periodik Jalan Dalam Kota	Jumlah ruas jalan dalam kota yang dipelihara secara periodik	-	-	5 ruas	1.500.000.000	5 ruas	1.537.500.000	5 ruas	1.575.937.500	5 ruas	1.615.335.938	20 ruas	6.228.773.438	KOTA PDG.PANJANG							
	Pemeliharaan rutin berkala trotoar	panjang trotoar yang dipelihara	-	-	500m	400.000.000	500m	410.000.000	500m	420.250.000	500m	430.756.250	500m	1.681.006.250	KOTA PDG.PANJANG							
	Pemeliharaan rutin jalan dalam kota	panjang jalan dalam kota yang terpelihara	-	-	400m	463.650.000	400m	463.650.000	400m	463.650.000	400m	463.650.000	400m	1.854.600.000	KOTA PDG.PANJANG							
	Penunjang DAK Infrastruktur jalan	Jumlah Bidang DAK yang terlaksana	-	-	1 paket	44.900.000	1 paket	44.900.000	1 paket	44.900.000	1 paket	44.900.000	1 paket	179.600.000	KOTA PDG.PANJANG							
	Penunjang DAK Infrastruktur jalan (Pemeliharaan Periodik)	Jumlah jalan dalam kota yang terpelihara secara periodik	-	-	1 paket	46.600.000	1 paket	46.600.000	1 paket	46.600.000	1 paket	46.600.000	1 paket	188.400.000	KOTA PDG.PANJANG							
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kebinamargaan	Jumlah alat berasif yang diadakan	-	-	-	-	2 unit (Dump truck, stamper)	365.000.000	-	-	3 unit (kendaraan pick up, breaker, genset)	235.000.000	5 unit	600.000.000	KOTA PDG.PANJANG							
	DAK Bidang Jalan	Jumlah paket jalan yang dibangun	-	-	2 paket	8.535.866.250	2 paket	8.952.448.513	2 paket	9.410.570.938	2 paket	9.881.099.485	8 paket	38.789.784.186	KOTA PDG.PANJANG							
	Pembangunan jalan wisata	-	-	-	1 paket (goa batu batrai dan air tajur tujuh tingkat)	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	KOTA PDG.PANJANG							
	OK	Program pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas	0%	12%	3.729.975.000	33%	2.800.000.000	50%	2.800.000.000	83%	2.756.520.000	100%	-2.800.000.000	14.888.485.000	KOTA PDG.PANJANG						
	Pembuatan DED Pedestrian	Jumlah DED Pedestrian yang disusun	-	-	1 dokumen	209.975.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	209.975.000	KOTA PDG.PANJANG						
	Pembangunan Trotoar	Jumlah ruas trotoar yang dibangun	-	-	13 ruas	2.720.000.000	2 ruas (Kawasan pasar imam bonjol, khalib sulaman)	2.000.000.000	2 ruas (Jl Soekarno hatta)	2.000.000.000	1 ruas (Jl.M.Yamin)	1.955.520.000	2 ruas 277,7 m (Jl.Jend Sudirman) dan 2940 (Jl.K.H.Agus Salim)	2.000.000.000	20 ruas	10.678.520.000	KOTA PDG.PANJANG					
	Rehabilitasi Trotoar	Panjang trotoar yang drehab	-	-	750 m	800.000.000	750 m	800.000.000	750 m	800.000.000	750 m	800.000.000	750 m	800.000.000	-	4.000.000.000	KOTA PDG.PANJANG					
		Rehab Trotoar RT 3 Silaing Alas dari Kp. Jawa sampai ke Pemakaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOTA PDG.PANJANG					
		Rehabilitasi Trotoar RT 13 Balai Balai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOTA PDG.PANJANG					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOTA PDG.PANJANG					
	Program Pembangunan Seluruh Daerah/Gorong-Gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik	97,86%	88%	300.000.000	89%	315.000.000	90%	330.750.000	91%	347.287.500	92%	364.651.875	92%	1.657.688.375	KOTA PDG.PANJANG						
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Periode pemeliharaan drainase/gorong-gorong yang dilaksanakan	-	-	300m	300.000.000	1 tahun	315.000.000	1 tahun	330.750.000	1 tahun	347.287.500	1 tahun	364.651.875	1 tahun	1.657.688.375	KOTA PDG.PANJANG					
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya jalan dan jembatan	na	1 tahun	12.398.855.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.398.855.000	KOTA PDG.PANJANG					
	Pemeliharaan Periodik Jalan Dalam Kota	Terlaksananya pemeliharaan periodik jalan dalam kota	-	-	1 tahun	3.214.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.214.500.000	KOTA PDG.PANJANG					
		Pengaspalan Jl. Adinegoro, Jl. Khalid Sulaman, dan Jl. Lingkar Pasar Sayur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOTA PDG.PANJANG					
		Pengaspalan Kompleks Pasar Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOTA PDG.PANJANG					
	Pemeliharaan rutin berkala trotoar	panjang trotoar yang dipelihara	-	-	1 Tahun	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000.000	KOTA PDG.PANJANG					
	Pemeliharaan rutin jalan dalam kota	Jumlah jalan dalam kota yang terpelihara	-	-	1 tahun	463.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463.650.000	KOTA PDG.PANJANG					
	Penunjang DAK Infrastruktur jalan	Jumlah Bidang DAK yang terlaksana	-	-	1 paket	91.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOTA PDG.PANJANG					
	Penunjang DAK Infrastruktur jalan (Pemeliharaan Periodik)	Jumlah jalan dalam kota yang terpelihara secara periodik	-	-	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOTA PDG.PANJANG					

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			LAPORAN KEGIATAN PENGETAHUAN		PERENCANAAN		TARGET		LAPORAN		PERENCANAAN		TARGET		LAPORAN		PERENCANAAN		TARGET		LAPORAN		PERENCANAAN				
			Kajian polensi pelebaran jalan	Jumlah dokumen kajian pelebaran jalan yang disusun	1 dokumen	100.000.000	TARGET	60.781.223.700	(Rp)	TARGET	62.792.286.937	(Rp)	TARGET	60.364.330.303	(Rp)	TARGET	70.820.549.710	(Rp)	TARGET	65.657.778.998	(Rp)	TARGET	343.418.159.661	(Rp)			
		DAK Bidang Jalan	Jumlah paket jalan yang dibangun	2 paket	8.129.205.000																		100.000.000	KOTA PDG PANJANG			
																							8.129.205.000	KOTA PDG PANJANG			
																								KOTA PDG PANJANG			
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Revitalisasi Jaringan Proyekir dan Lainnya	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	48.000 m	65%	2.229.661.000	75%	2.231.318.537	75%	2.310.744.743	60%	2.354.351.390	65%	2.437.493.590	84%	31.553.570.659	100%	31.553.570.659	100%	31.553.570.659	100%	31.553.570.659	100%	KOTA PDG PANJANG			
		Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	3.060 m	1.346.000.000	3.060 m	1.308.105.487	3.060 m	1.346.000.000	3.060 m	1.346.000.000	3.060 m	1.379.850.000	3.060 m	1.379.850.000	3.060 m	6.725.755.487	100%	6.725.755.487	100%	6.725.755.487	100%	6.725.755.487	100%	KOTA PDG PANJANG		
		Penunjang DAK Infrastruktur Irigasi	Jumlah Bidang DAK yang terlaksana	1 Bidang	92.600.000	1 Bidang	92.600.000	1 Bidang	92.600.000	1 Bidang	92.600.000	1 Bidang	96.304.000	1 Bidang	96.304.000	1 Bidang	465.704.000	100%	465.704.000	100%	465.704.000	100%	465.704.000	100%	KOTA PDG PANJANG		
		DAK Bidang Irigasi	Jumlah paket irigasi yang dibangun	8 paket	791.061.000	8 paket	830.614.050	8 paket	872.144.753	8 paket	915.751.990	8 paket	981.539.590	8 paket	4.371.111.382	8 paket	4.371.111.382	8 paket	4.371.111.382	8 paket	4.371.111.382	8 paket	4.371.111.382	8 paket	KOTA PDG PANJANG		
																									KOTA PDG PANJANG		
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai	Persentase panjang sungai yang dikonservasi	3 sungai	3 sungai	702.150.000	3 sungai	1.000.000.000	3 sungai	1.012.500.000	3 sungai	1.025.312.500	3 sungai	1.038.445.313	3 sungai	4.778.407.813	3 sungai	4.778.407.813	3 sungai	4.778.407.813	3 sungai	4.778.407.813	3 sungai	KOTA PDG PANJANG			
		Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Jumlah ruas sungai yang dinormalisasi				2 ruas	500.000.000	2 ruas	512.500.000	2 ruas	525.312.500	2 ruas	538.445.313	10 ruas	2.076.257.813	10 ruas	2.076.257.813	10 ruas	2.076.257.813	10 ruas	2.076.257.813	10 ruas	KOTA PDG PANJANG			
		Pembangunan Pengaman Sungai	panjang pengaman sungai yang dibangun	265 m	702.150.000	265 m	500.000.000	265 m	500.000.000	265 m	500.000.000	265 m	500.000.000	265 m	500.000.000	265 m	2.702.150.000	265 m	KOTA PDG PANJANG								
																									KOTA PDG PANJANG		
																									KOTA PDG PANJANG		
																									KOTA PDG PANJANG		
																									KOTA PDG PANJANG		
		DAK	Program Penetapan Jalan Umum	Persentase Penetapan Jalan Umum (Penetapan PJU sedep 50 m dibagikan panjang jalan (kota/kota dan jalan kota))	61.84%	73%	2.372.749.600	74%	1.200.000.000	80%	2.336.950.000	85%	2.523.945.000	90%	2.126.781.757	90%	4.764.406.357	100%	4.764.406.357	100%	4.764.406.357	100%	4.764.406.357	100%	KOTA PDG PANJANG		
			Penambahan Jaringan Tiang dan Lampu Jalan dalam Kota	Jumlah jaringan tiang dan lampu jalan dalam kota	360 titik	1.723.750.000	100 titik	500.000.000	300 titik	1.839.950.000	300 titik	1.823.945.000	250 titik	1.426.781.757	1250 titik	7.314.406.757	100%									KOTA PDG PANJANG	
			Pemeliharaan Jaringan Tiang dan Lampu Jalan dalam Kota	Jumlah jaringan tiang dan lampu jalan dalam kota yang terpelihara	1.500	649.999.600	1.800	700.000.000	2.100	700.000.000	2.285	700.000.000	2.470	700.000.000	2.470	3.449.999.600	2.470	3.449.999.600	2.470	3.449.999.600	2.470	3.449.999.600	2.470	3.449.999.600	2.470	KOTA PDG PANJANG	
			Program Bangunan Air Kotor	Panjang bangunan air kotor yang dibangun	1 paket	3.629.000.000																				3.629.000.000	KOTA PDG PANJANG
			Bangunan Pembuangan Air Kotor	Jumlah bangunan pembuangan air kotor yang dibangun	10 Lokasi	3.629.000.000																				3.629.000.000	KOTA PDG PANJANG
																									KOTA PDG PANJANG		
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Pelayanan Air limbah	-77.04%	-77.04%	3.428.106.000	80%	4.900.949.830	91%	7.105.871.613	92%	6.437.425.877	93%	5.014.922.704	83%	27.947.007.915	100%	27.947.007.915	100%	27.947.007.915	100%	27.947.007.915	100%	KOTA PDG PANJANG		
				Cakupan Pelayanan Air minum	-91.09	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	KOTA PDG PANJANG	
			Dana Penunjang Operasional (DAK Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah)	Jumlah pembangunan infrastruktur air minum adan air limbah yang ditugaskan	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	KOTA PDG PANJANG		
			DAK Infrastruktur Air Bersih	Jumlah paket Air Bersih yang dibangun	1 paket	1.028.108.000	1 paket	1.059.232.320	1 paket	1.112.001.613	1 paket	1.156.481.677	1 paket	1.202.740.944	1 paket	1.568.564.555	1 paket	1.568.564.555	1 paket	1.568.564.555	1 paket	1.568.564.555	1 paket	1.568.564.555	KOTA PDG PANJANG		
			DAK Sanitasi Air Limbah	Jumlah paket Sanitasi Air Limbah yang dibangun	4 paket	2.250.000.000	4 paket	2.340.000.000	4 paket	2.433.800.000	4 paket	2.530.944.000	4 paket	2.632.181.760	4 paket	2.632.181.760	4 paket	2.632.181.760	4 paket	2.632.181.760	4 paket	2.632.181.760	4 paket	2.632.181.760	KOTA PDG PANJANG		
			Bangunan Pembuangan Air Kotor	Jumlah bangunan pembuangan air kotor yang dibangun	5 Lokasi	1.141.717.500	15 Lokasi	3.500.000.000	10 Lokasi	2.600.000.000	8 Lokasi	2.000.000.000	8 Lokasi	9.241.717.500	9.241.717.500	9.241.717.500	9.241.717.500	9.241.717.500	9.241.717.500	9.241.717.500	9.241.717.500	9.241.717.500	9.241.717.500	9.241.717.500	KOTA PDG PANJANG		
			Pengembangan jaringan distribusi air minum	Jumlah sambungan rumah yang di buat		150 KK	200.000.000																		200.000.000	KOTA PDG PANJANG	
																									KOTA PDG PANJANG		

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			PERENCANAAN		TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
Meningkatnya kesadaran guna lahan dengan mengelola lahan dengan baik	4. Persentase Pemanfaatan Tata Ruang dan Tata Bangunan				60.781.223.700		62.792.286.957		60.364.330.305		70.820.549.710		86.657.778.998		343.416.169.669	KOTA PDG. PANJANG			
	Program Pengelolaan Ruang Terbatas Hiu	Persentase RT/H Public	2,4%	2,4%	4.490.007.550	2,7%	22.805.000.000	2,8%	4.516.000.000	3,0%	3.737.400.000	3,0%	13.485.555.681	3,7%	46.805.983.231	KOTA PDG.PANJANG			
	Penataan RT/H	Jumlah Jenis Perlengkapan RT/H yang diadakan	5 paket (RT/H Silang Bawah, Taman Gantangan, DED , verticle garden, lomba taman)	1.548.390.000											5 paket	1.548.390.000	KOTA PDG.PANJANG		
	Pemeliharaan RT/H	Jumlah RT/H yang terpelihara	2 lokasi	2.011.317.550	2 lokasi	2.085.000.000	2 lokasi	2.118.000.000	2 lokasi	2.287.400.000	2 lokasi	12 RT/H	8.501.717.550	KOTA PDG.PANJANG			0	KOTA PDG.PANJANG	
	Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	Jumlah RPTRA/RBRA yang dibangun	1 lokasi (RT 18 Siba)	230.350.000											2 lokasi	230.350.000	KOTA PDG.PANJANG		
	Revisi Masterplan RT/H	Jumlah dokumen Masterplan RT/H	1 dokumen	250.000.000											1 dokumen	250.000.000	KOTA PDG.PANJANG		
	Perencanaan Pembangunan/Pengembangan Taman Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Taman Kota	2 Dokumen	449.950.000											-	2 dokumen	449.950.000	KOTA PDG.PANJANG	
	Penyusunan Dokumen Izin Lingkungan	Jumlah dokumen izin lingkungan yang disusun			1 dokumen														
	Penataan RT/H	Jumlah RT/H Yang ditata			2 paket (pembuatan taman dan lomba)	20.520.000.000	2 paket (pembuatan taman dan lomba)	2.400.000.000	2 paket (pembuatan taman dan lomba)	1.450.000.000	2 paket (pembuatan taman dan lomba)	13.455.555.681	8 paket (pembuatan taman dan lomba)	37.825.555.681	KOTA PDG.PANJANG				
		Rest Area Silang Bawah													Plaza rest area				
		Jumlah RPTRA/RBRA yang dibangun					4 lokasi		2 lokasi		4 lokasi		10 Lokasi						
		Jumlah dokumen izin lingkungan yang disusun			1 dokumen										1 Dokumen			KOTA PDG.PANJANG	
	Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio Bangunan BerIMB per Satuan bangunan	0,762	0,766	728.098.800	0,767	7.698.650.000	0,768	6.348.716.147	0,769	10.727.877.484	0,770	3.651.783.080	0,770	29.153.125.491	KOTA PDG.PANJANG			
	Pembinaan Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung	Jumlah dokumen advice yang diberikan oleh Tim ahli bangunan gedung	6 buah	50.700.000	6 buah	40.000.000	6 buah	40.000.000	6 buah	40.000.000	6 buah	40.000.000	30 buah	210.700.000	KOTA PDG.PANJANG				
	Koordinasi perencanaan tata ruang	Jumlah raker perencanaan yang diaksanakan	4 kali	18.650.000	4 kali	19.650.000	4 kali	19.650.000	4 kali	20.000.000	4 kali	20.000.000	20 laporan	97.950.000	KOTA PDG.PANJANG				
	Revisi Perda RTRW	Jumlah perda RTRW yang direvisi	1 dokumen	350.000.000		350.000.000		350.000.000							1 dokumen	1.050.000.000	KOTA PDG.PANJANG		
	Survey dan Pemetaan	Jumlah dokumen survey pemetaan yang dihasilkan	200 dokumen	19.999.800	200 dokumen	20.000.000	200 dokumen	20.000.000	200 dokumen	20.000.000	200 dokumen	20.000.000	10000 dokumen	99.999.800	KOTA PDG.PANJANG				
	Perubahan Sertifikat Tanah Masyarakat yang Terkena Fasum	Jumlah sertifikat yang diproses	6 sertifikat	50.000.000	6 sertifikat	50.000.000	6 sertifikat	50.000.000	6 sertifikat	50.000.000	6 sertifikat	50.000.000	30 sertifikat	250.000.000	KOTA PDG.PANJANG				
	Pematakan tanah yang telah diserahkan masyarakat untuk fasum	Jumlah patok yang diadakan dan dilaksanakan	75 patok	49.000.000	75 patok	49.000.000	75 patok	49.000.000	75 patok	49.000.000	75 patok	49.000.000	375 patok	245.000.000	KOTA PDG.PANJANG				
	Entry Plotting Data Advice Planning dan IMB	Jumlah dokumen IMB dan Advice Planning yang dihasilkan	1 dokumen	170.000.000											1 dokumen	170.000.000	KOTA PDG.PANJANG		
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah pengawasan pemanfaatan ruang yang dilakukan	96 kali	19.749.000	96 kali	20.000.000	96 kali	20.000.000	96 kali	20.000.000	96 kali	20.000.000	480 kali	99.749.000	KOTA PDG.PANJANG				
	Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum	Jumlah Segmen tanah Yang di adakan	1 segmen	6.950.000.000	1 segmen	5.748.066.147	1 segmen	10.428.877.484		3.402.783.050	3 segmen	26.529.726.681	KOTA PDG.PANJANG						
		Lingkar Selatan			6.450.000.000									segifikat	6.450.000.000	KOTA PDG.PANJANG			
		Peleburan Jalan St. Syahrir			-		2.248.066.147		5.428.877.484					segifikat	8.675.943.631	KOTA PDG.PANJANG			
		Eks Bioskop Karya + seberangnya							2 segmen	4.000.000.000					segifikat	4.000.000.000	KOTA PDG.PANJANG		
		Tanah untuk peleburan Rest Area			500.000.000										500.000.000	KOTA PDG.PANJANG			
		Tanah Perkantoran					1 kali	3.500.000.000							3.402.783.050	6.902.783.050	KOTA PDG.PANJANG		
	Sosialisasi Peraturan Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi Peraturan Penataan Ruang yang dilakukan			1 kali	50.000.000			1 kali	50.000.000			1 kali	100.000.000	KOTA PDG.PANJANG				

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	SATUAN KERJA	PERENCANAAN	TARGET		(Rp)	TARGET		(Rp)	TARGET		(Rp)	TARGET		(Rp)	TARGET		(Rp)		
				KODE	NAMA															
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Database tata ruang berbasis Sistem Informasi Geografis	Jumlah data IMB dan AP yang tersedia.		60.781.223.700		62.792.286.957		60.384.330.308		70.820.549.710		88.657.778.998		343.416.169.468		KOTA PDG. PANJANG				
						2 Dok	150.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	8 Dok	300.000.000	KOTA PDG PANJANG				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Percentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90%	4.310.878.750	90%	4.192.901.575	90%	4.428.578.750	90%	4.428.578.750	90%	4.428.828.750	90%	21.789.766.575	KOTA PDG PANJANG					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang diadakan	670 lbr	3.270.000											670 lembar	3.270.000	KOTA PDG PANJANG			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	125 rekening	2.898.200.000											125 rekening	2.898.200.000	KOTA PDG.PANJANG			
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perzirian kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	3 unit roda 6, 9 unit roda 4, 19 unit roda 2	589.288.250	3 unit roda 6, 9 unit roda 4, 19 unit roda 2	530.359.425	3 unit roda 6, 9 unit roda 4, 19 unit roda 2	685.540.250	3 unit roda 6, 9 unit roda 4, 19 unit roda 2	685.540.250	3 unit roda 6, 9 unit roda 4, 19 unit roda 2	685.540.250	3 unit roda 6, 9 unit roda 4, 19 unit roda 2	3.176.268.425	KOTA PDG.PANJANG					
	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan yang tersedia	1 paket, 7 orang	216.507.000	1 paket, 7 orang	213.757.000	1 paket, 7 orang	1.070.535.000	KOTA PDG.PANJANG											
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	30 jenis	44.650.000											44.660.000	KOTA PDG.PANJANG				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	53.989.900											53.989.900	KOTA PDG.PANJANG				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	1 tahun	7.413.600											7.413.600	KOTA PDG.PANJANG				
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat	1080 ok	19.650.000	1080 ok	17.595.000	1080 ok	19.650.000	1080 ok	95.819.000	KOTA PDG.PANJANG									
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	1 tahun	481.000.000	1 tahun	432.900.000	1 tahun	500.000.000	5 tahun	2.413.900.000	KOTA PDG.PANJANG									
	Pengadaan cetak dokumen dan Jasa surat menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang diadakan		670 lbr	102.090.150	670 lbr	113.523.500	670 lbr	113.523.500	670 lbr	113.773.500	670 lbr	113.773.500	2.680 lbr						
		Jumlah alat tulis kantor yang disediakan			30 jenis		30 jenis		30 jenis		30 jenis		30 jenis		120 jenis					
		Barang cetakan dan penggandaan				2 jenis		8 jenis												
		Jumlah laporan capaian kinerja dan khsusus realisasi kinerja OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun				20 laporan		80 laporan												
		Jumlah perencanaan dan Pelaporan				9 Dokumen		36 Dokumen												
	Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik,Air dan Komunikasi	Jumlah tagihan rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan				125 Rekening	2.898.200.000	500 Rekening												
		Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor				10 Jenis		40 Jenis												
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Percentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	0,9	44.175.000	0,9	269.733.750	0,9		0,9	778.151.500	0,9	6.050.000.000	0,9	7.142.050.250	KOTA PDG.PANJANG					
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah paket pemeliharaan	1 Paket upah pengelatan	30.000.000	1 Paket upah pengelatan										1 Paket upah pengelatan	30.000.000	KOTA PDG.PANJANG			
	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	35 kali	14.175.000	35 kali										35 kali	14.175.000	KOTA PDG.PANJANG			
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					5 jenis (drone, dls)	150.000.000			15 jenis	250.000.000				50.000.000	450.000.000	KOTA PDG PANJANG			
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Roda Dua				6 Unit	-								6 Unit	0	KOTA PDG PANJANG			
		Pengadaan Kendaraan Roda Empat				1 pick up	0								1 bh minibus,2 bush Pick Up	0	KOTA PDG PANJANG			
	penyusunan DED Pembangunan Kantor Dinas PU/PUR	Jumlah dokumen DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU/PUR yang dibuat													1 dokumen	400.000.000				
	pembangunan gedung kantor Dinas PU/PUR	Jumlah gedung Kantor Dinas PU/PUR yang dibangun													1 unit	6.000.000.000	1 unit	6.000.000.000	KOTA PDG PANJANG	
	Pengadaan tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Lokasi Tanah yang diadakan													1 lokasi		0	KOTA PDG.PANJANG		
	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakalan Dinas Harian (PDH) dan Perlengkapannya				190 Stel	77.850.000			190 Stel	81.742.500				380 stel	159.592.500	KOTA PDG PANJANG			
	Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pemeliharaan				1 paket upah dan bahan	41.883.750	1 paket upah dan bahan	145.627.900	1 paket upah dan bahan	46.409.000	1 paket upah dan bahan	47.229.000	4 paket upah dan bahan						
		Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				36 kali		144 kali												
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakalan Dinas beserta perlengkapannya				0	0	0							0	0	0	KOTA PDG PANJANG		

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KODE KEGIATAN	PERENCANAAN	TARGET		PENGETAHUAN		TARGET		PENGETAHUAN		TARGET		PENGETAHUAN		TARGET		PENGETAHUAN		TARGET		PENGETAHUAN	
			(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Percentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	500.000.000	KOTA PDG PANJANG				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bintek yang diku&	30 kali	100.000.000	15 kali	100.000.000	15 kali	50.000.000	30 kali	100.000.000	30 kali	100.000.000	150 kali	450.000.000	KOTA PDG PANJANG						
		Pelatihan Kantor Sendiri	Jumlah Bintek yang diku&		1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000														
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Percentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100%	67.200.000	100%											100%	67.200.000	KOTA PDG PANJANG			
		Penyusunan laporan kinerja keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun	20 laporan	1.690.000												20 laporan	1.690.000	KOTA PDG PANJANG			
		Penyusunan perencanaan Pelaporan Kinerja Perangkat daerah	Jumlah perencanaan dan Pelaporan	9 Dokumen	500.000												9 laporan	500.000	KOTA PDG PANJANG			
		Penyusunan buku analisa harga satuan pekerjaan dinas pekerjaan umum	Jumlah dokumen yang dibuat	1 dokumen	65.010.000													65.010.000	KOTA PDG PANJANG			

PEMERINTAH DAERAH
 Padang Panjang, Mei 2019
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG
 YAS EDIZARWIN, SE
 Nip. 196307271992231004

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENGETAHUAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJAMAN

INDEX

INDEX

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDAMAN					KONDISI KONTRA PADA AKHIR	LOKASI	
					2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	TARGET	TARGET
		Program Pengabdian Disingkat Apatur				190 Staf		190 Staf		300 Staf	KOTA POGO PAN	
		Pengabdian Pakuan Dinas Beasiswa Pelengkaptanya				190 Sud		190 Sud		300 Sud	KOTA POGO PAN	
		Program Peningatan Kapasitas Sumber Daya Apatur	Peningkatan kapasitas sumber daya apatur			90%	90%	90%	90%	90%	KOTA POGO PAN	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peritama Perundang - undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan		30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	150 kali	KOTA POGO PAN	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencaman, Pendapatan Capatan Kritis dan Keuanginan	Percentage pencarian dan laporan capatan kritis dan keuanginan yang disampaikan dapat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	KOTA POGO PAN	
		Penyusunan Laporan Kritis dan Keuangan Pemimpin Dinas	Jumlah laporan capatan kritis dan ketiga satuan kerja DPO, laporan ketiga satuan kerja pengadaan, laporan ketiga satuan kerja pengadaan hasil anggaran dan laporan akhir tahun		20 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100 laporan	KOTA POGO PAN	
		Penyusunan perencanaan dan Pelaporan Kritis Pemimpin	Jumlah perencanaan dan Pelaporan		9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	45 Dokumen	KOTA POGO PAN	
		Penyusunan bukti antisipasi bagi sistem pelaporan dinas pokok jenjang umum	Jumlah dokumen yang dibuat		1 Dokumen						KOTA POGO PAN	

PILAR	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target						
						2019	2020	2021	2022	2023	Target Akhir Perencanaan	
PILAR 1 MISI 1: Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan												
EKONOMI	1 Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Indeks	5,81	5,96	6,04	6,11	6,14	6,26	6,26	
		1 Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	1 Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	%	2,79	3,05	3,17	3,30	3,43	3,56	3,56	
			2 Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran	%	4,57	5,02	5,24	5,47	5,69	5,92	5,92	
			3 Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor industri	%	2,19	2,28	2,33	2,37	2,42	2,46	2,46	
			4 Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	7,48	7,61	7,67	7,73	7,80	7,86	7,86	
			5 Persentase Kenaikan Kunjungan Wisata	%	na	10	20	30	40	50	50	
		2 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	6 Persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	%	na	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,50	
			7 IKLH	Indeks	69,18	69,77	70,07	70,37	70,66	70,96	70,96	
	2 Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat		PDRB Perkapita	Rp.juta	44,12	48,19	50,42	52,80	55,34	58,05	58,05	
		3 Menurunnya ketimpangan kesejahteraan masyarakat	8 Indeks Gini	Indeks	0,30	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24	
		4 Menurunnya Angka Kemiskinan	9 Angka Kemiskinan	%	6,17	5,45	5,03	4,60	4,18	3,75	3,75	

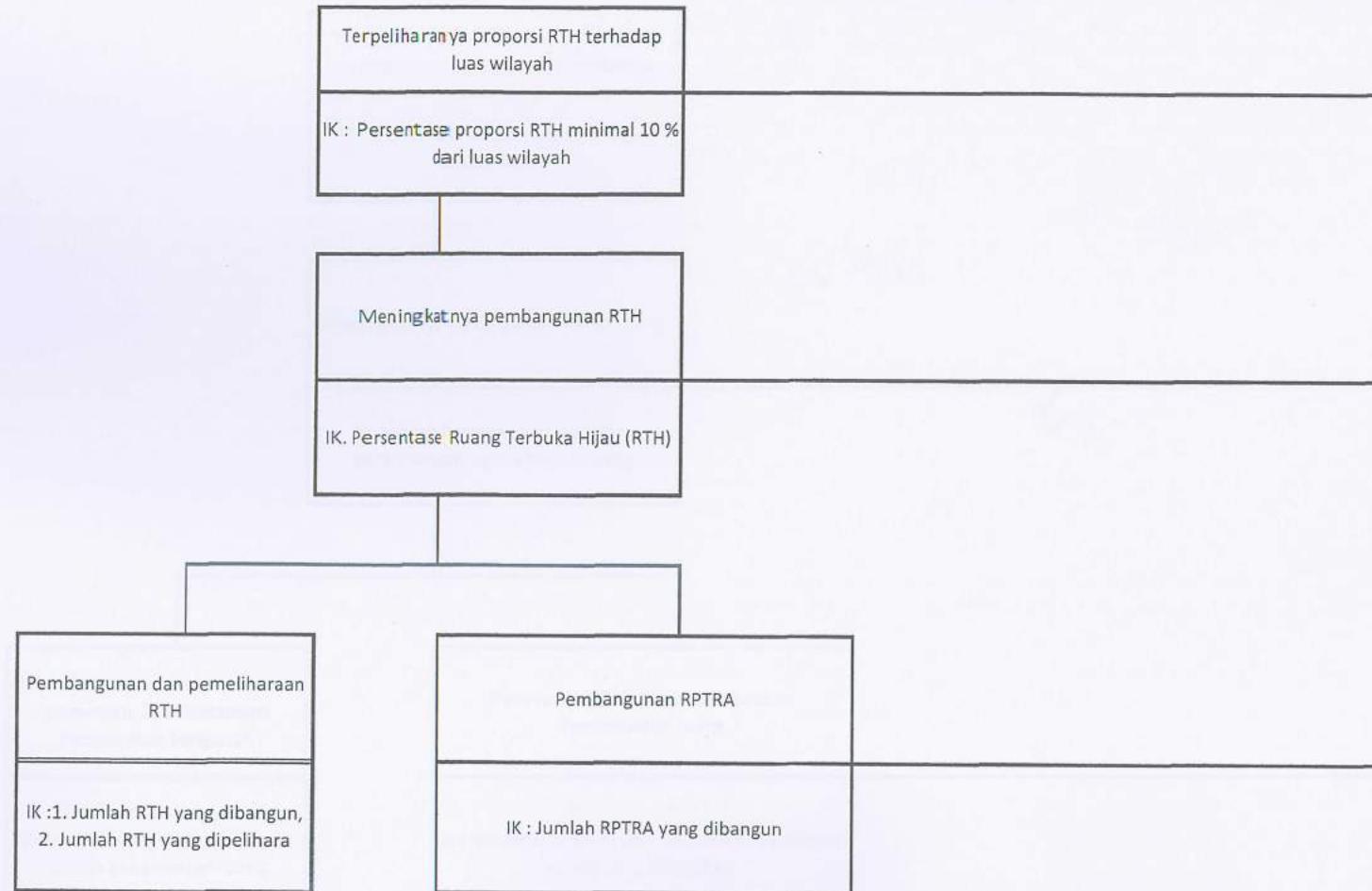
			5	Menurunnya tingkat pengangguran	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,43	4,84	4,72	4,59	4,47	4,34	4,34
			6	Meningkatnya pendapatan masyarakat	11	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat)	(Ribu Rupiah)	10,24	10,29	10,31	10,34	10,36	10,39	10,39
MISI 2: Menigkatkan Pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhhlak dan berbudaya														
PILAR 2 & 3			3	Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhhlak dan unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,01	78,25	78,86	79,48	80,10	80,72	80,72
PENDIDIKAN,			7	Meningkatnya Pemerataan kualitas daya saing pendidikan	12	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,43	11,88	12,11	12,33	12,56	12,78	12,78
					13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,03	15,27	15,38	15,50	15,62	15,74	15,74
KESEHATAN			8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	14	Angka harapan hidup (AHH)	Tahun	72,46	72,47	72,47	72,48	72,48	72,49	72,49
SOSIAL DAN KEAGAMAAN	4	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenram dan agamis				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keamanan	%	95,16	96,37	97,28	98,19	99,09	100,00	100,00
			9	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	15	Percentase Penurunan jumlah PMKS	%	2,94	2,34	2,04	1,73	1,43	1,13	1,13
			10	Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat	16	Percentase aktivitas Kegiatan keagamaan dimesjid	%	20,39	38,82	56,58	74,34	90,79	100,00	100,00
PILAR 4	MISI 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif													
PELAYANAN UMUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	54,94	62	64	66	68	70	70
			11	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	17	Predikat Sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai		B (65)	BB (70)	BB (74)	BB (78)	A (80,02)	A (80,02)
					18	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			12	Terselanggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani	19	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77,64 (Baik)	78 (Baik)	79 (Baik)	80 (Baik)	81 (Baik)	82 (Baik)	82 (Baik)

	6	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan		% lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	n/a	70	75	80	85	90	90
	13	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	20	% lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	n/a	70	75	80	85	90	90
	14	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	21	Indek Pemberdayaan Perempuan (IDG)	Indeks	76,10	77,50	78,90	80,30	81,70	83,10	83,10

				5 Optimalisasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD		Peningkatan perekonomian masyarakat berorientasi kesejahteraan sosial berdasarkan kebutuhan, minat, bakat, dan warga sekolah pendidikan dasar	90	95	100	100	100	
					2 Program Pendidikan Masyarakat	Angka Ketulusan Pendidikan Paket A/B/C		Penyelenggaraan PAUD	4.000.000.000	5.000.000.000	5.600.000.000	6.400.000.000	8.000.000.000	
								Penyelenggaran pondidikan kesetaraan	250.000.000	312.500.000	350.000.000	400.000.000	500.000.000	
			10 Standarisasi infrastruktur dan akses pelajaran yang terbuka dan sehat	1 Peningkatan standarisasi dan kualitas Infrastruktur Pendidikan	1 Program Peningkatan Standarisasi Sarana Prasarana Pendidikan	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik			60	70	80	100	100	
						Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik			60	70	80	100	100	
								Revitalisasi sarana prasarana SD TK	9.000.000.000	11.250.000.000	12.600.000.000	14.400.000.000	18.000.000.000	
								Revitalisasi sarana prasarana SMP	3.000.000.000	3.750.000.000	4.200.000.000	4.850.000.000	6.000.000.000	
KESEHATAN	8 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	10 Peningkatan Kualitas Pelayanan kesehatan	1 Gerakan Padang Panjang Sehat	1 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Penduduk yang Berperilaku Hidup Sehat (PHBS)	75		80	85	90	95	100		
								Sanitasi total berbasis masyarakat (jamban soal)	502.550.000	515.113.750	527.991.594	541.191.384	554.721.168	
					2 Program Peningkatan Olah Raga	Jumlah Pemohon Cukai yang melakukan olahraga yang diluar jam sekolah, cukup dengan olahraga yang salah			100 KK	100 KK	100 KK	100 KK	100 KK	
								Pengadaan Tarif untuk Sport Centres	20.000.000.000					
								Peningkatan Sport centre	600.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000			
								Persebaran olahraga				20.000.000.000		
								Pengembangan olahraga				1.000.000.000		
								Kelengkapan olahraga				1.000.000.000		
					2 Meningkatkan kualitas pelayanan daur dan rujukan	1 Program Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan	Sertifikat PPA (professional pemburi asuhan)		70%	80%	90%	100%	100%	
								Pelatihan tenaga Kesehatan	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	
						2 Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Pasien	baik	B	B	B PLUS	A	A PLUS	
								Smart Hospital	100.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	
						3 Program standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tingkat Akreditasi Puskesmas		2 Utama, 1 Madya, 1 Dasar	1 paripurna, 2 utama, 1 madya	1 paripurna, 2 utama, 1 madya	3 paripurna, 1 madya	3 paripurna, 1 Utama	
								Akreditasi Puskesmas	113.727.500	23.710.000	282.810.000	311.091.000	342.200.000	
						3 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui "Dokter Warga dan PSC 119"	1 Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Akses pelayanan kesehatan langsung	5	20	35	50	65	
								Pelayanan Kesehatan masyarakat melalui dokter warga	418.536.600	418.000.000	460.000.000	506.429.000	557.072.000	
								Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (PK3) dan Bencana, serta Pemberian Public Service Center (PSC) 119	1.095.355.600	1.204.800.000	1.325.377.000	1.457.915.000	1.693.707.000	
						3 Program Peningkatan Gizi Masyarakat	Percentase stunting	19,70	18	16,7	14,6	12,9	11,2	
								Pemberian makanan dan tambahan vitamin	51.250.000	56.375.000	62.012.000	68.213.000	75.035.000	
						4 Optimalisasi pengendalian penduduk	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR		2,27	2,24	2,21	2,18	
								Akreditasi Puskesmas	113.727.500	23.710.000	282.810.000	311.091.000	342.200.000	
						11 Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan	4 Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana pelayanan kesehatan	1 Program peningkatan kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah	Percentase kelengkapan sarana RSUD	62,5	70	77,5	80	88,5
								Pembangunan IBS	10.000.000.000	12.000.000.000	13.000.000.000			
SOSIAL DAN KEAGAMAAN	4 Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tetramat dan agamis	9 Memerlukannya Masaiah Kesejahteraan Sosial	12 Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pemberdayaan, Jaminan SOSIAL	1 Program Peningkatan faktir Miskin	% penanggulangan Faktir Miskin				80	80	80	80	
								Penanggulangan faktir miskin/penerima bantuan faktir miskin	135.546.000	352.000.000	569.600.000	398.000.000	427.770.000	
						2 Program Penanggulangan Penyalahgunaan masalah kesejahteraan Sosial	% penanggulangan PMKS		80	80	80	80	80	
								Pembinaan kelompok usaha bersama faktir miskin	132.600.000	139.230.000	146.000.000	153.300.000	160.965.000	

PILAR	MISI	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BUDGET	PERENCANAAN		IMPLEMENTASI		MONITORING DAN EVALUASI		APPROVAL
					PERENCANAAN	IMPLEMENTASI	MONITORING DAN EVALUASI	APPROVAL	PERENCANAAN	IMPLEMENTASI	
PELAYANAN UMUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNA N	MISI 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif										
5	5 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	11 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	14 Pengawas Sistem Pengendalian Intern	1 Peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah	1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RJPBD		80	83	83	85 BAPPEDA
				2 Program Penilaian dan Pengontrolan	Persentase hasil penilaian kajian yang digunakan dalam perumusan kebijakan daerah			50	60		80 90 BAPPEDA
			3 Peningkatan Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	SPI level 3 (3,85) 2017.		SPI level 3 (3,0)	SPI level 3 (3,1)	SPI level 3 (3,3)	SPI level 3 (3,5)	SPI level 3 (3,7) Inspektorat Kota
			4 Peningkatan capaian kinerja daerah	1 Program Peningkatan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	% OPD dengan nilai evaluasi kinerja "Baik"		Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	154.200.000	100.000.000	350.000.000	350.000.000 400.000.000 Bag Organisasi
			5 Optimalisasi penilaian, penyelarasan dan pelesterian arsip	1 Program penilaian dan pelesterian arsip daerah	keterpatutan waktu penyusunan APBD dan laporan Keuangan sesuai dengan SAP		Tepat Waktu dan Sesuai	Tepat Waktu dan Sesuai	Tepat Waktu dan Sesuai	Tepat Waktu dan Sesuai	BPRD
			6 Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi "Smart City"	1 Program peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	% p. mensifatkan aset daerah		72	74	76	78	80 BPKD
				2 Program e-Governance	% kenaikan arsip statis		7,7	10,7	11,6	12,1	12,9 Dinas Perpustakaan dan Arsip
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas informasi publik		2,6	2,65	2,7	2,85	3,00 Diskominfo
					Persebarluasan informasi yang berfaedah penyuluhan bagi masyarakat (masyarakat verifikasi melekat)		283.000.000	283.000.000	283.000.000	283.000.000	283.000.000
					Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		2,70	2,75	2,80	2,85	3,00 Diskominfo
					Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur TI (command centre), Smart City		5.285.201.400	6.089.960.000	3.753.560.000	4.610.240.000	5.302.000.000

SASARAN STRATEGIS 2



PERJANJIAN KINERJA ESELON II

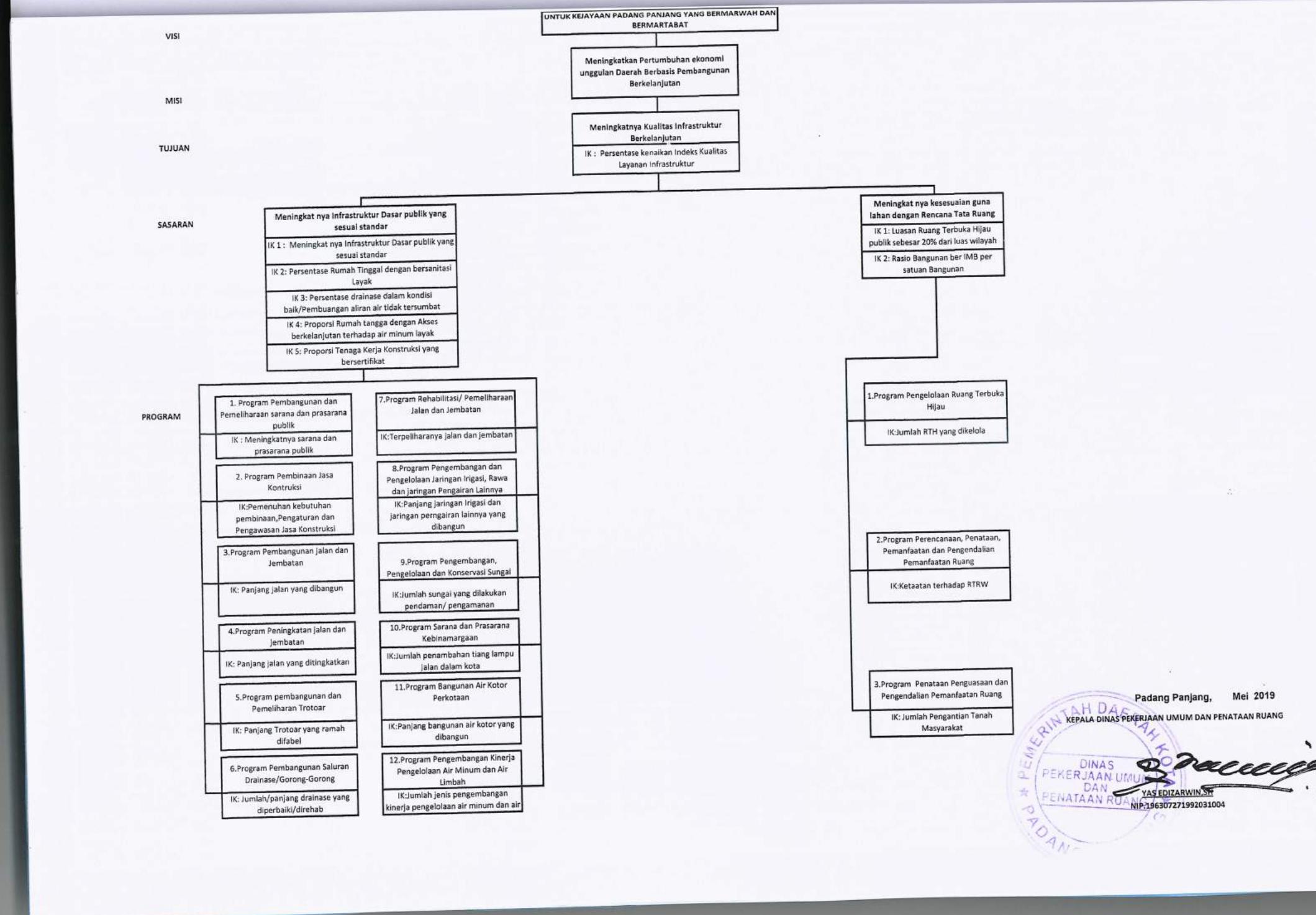
PERJANJIAN KINERJA ESELON III

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Padang Panjang, Mei 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG





Padang Panjang, Mei 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS
PEKERJAAN UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
NIP.196307271992031004



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT)	DATA CAPIAAN PADA TAHAP AWAL PERENCANAAN (2017)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2023)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
						TAHUN 1					TAHUN 2					TAHUN 3			TAHUN 4		TAHUN 5		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	RUPIAH	17	18	19	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan			Percentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur																				
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Percentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		4.424.388.750	90%	7.248.679.727	90%	6.161.915.680	90%	7.338.790.560	90%	8.546.390.226		DINAS PUPR							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembelian meterai, jumlah paket yang dikirimkan	670 lbr	670 lbr	3.270.000	670 lbr	3.597.000	670 lbr	3.956.000	670 lbr	4.352.000	670 lbr	4.787.200	3350 lembar	DINAS PUPR						
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	125 rekening	2.896.200.000	125 rekening	3.475.440.000	125 rekening	4.170.528.000	125 rekening	5.004.633.600	125 rekening	6.005.560.320	625 rekening	DINAS PUPR							
			Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	670 lbr	3 unit roda 6, 11 unit roda 4, 19 unit roda 2	685.540.250	3 unit roda 6, 11 unit roda 4, 19 unit roda 2	788.371.287	3 unit roda 6, 11 unit roda 4, 19 unit roda 2	906.626.980	3 unit roda 6, 11 unit roda 4, 19 unit roda 2	1.042.600.000	3 unit roda 6, 11 unit roda 4, 19 unit roda 2	1.199.014.000	3 unit roda 6, 11 unit roda 4, 19 unit roda 2	DINAS PUPR						
			Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan yang tersedia		1 paket, 7 orang	213.757.000	1 paket, 7 orang	2.244.444.850	1 paket, 7 orang	235.667.000	1 paket, 7 orang	247.450.000	1 paket, 7 orang	259.822.000	1 paket, 7 orang	DINAS PUPR						
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan		30 jenis	44.660.000	30 jenis	49.126.000	30 jenis	54.038.600	30 jenis	59.442.460	30 jenis	65.386.706	30 jenis	DINAS PUPR						
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		1 Tahun	53.989.900	1 Tahun	59.388.890	1 Tahun	65.327.800	1 Tahun	71.860.000	1 Tahun	79.046.000	5 tahun	DINAS PUPR						
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penanganan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 tahun	7.413.600	1 tahun	7.784.200	1 tahun	8.173.500	1 tahun	85.821.000	1 tahun	9.011.000	5 tahun	DINAS PUPR						
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat		1080 ok	19.558.000	1080 ok	20.527.500	1080 ok	21.553.800	1080 ok	22.631.500	1080 ok	23.763.000	5400 ok	DINAS PUPR						
			Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		1 tahun	500.000.000	1 tahun	600.000.000	1 tahun	700.000.000	1 tahun	800.000.000	1 tahun	900.000.000	5 tahun	DINAS PUPR						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Percentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		0,9	44.175.000	0,9	1.139.883.750	0,9	55.627.900	0,9	16.024.309.000	0,9	67.229.000		DINAS PUPR						
			Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah paket pemeliharaan		1 Paket upah pengecatan	30.000.000	1 Paket upah pengecatan	35.000.000	1 Paket upah pengecatan	40.000.000	1 Paket upah pengecatan	45.000.000	1 Paket upah pengecatan	50.000.000	5 Paket upah pengecatan	DINAS PUPR						
			Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Jumlah alat kantor yang diperbaiki		36 kali	14.175.000	36 kali	14.883.750	36 kali	15.627.900	36 kali	16.409.000	36 kali	17.229.000	180 kali	DINAS PUPR						
			Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor												500.000.000								
			Pengadaan Kendaraan Roda Dua					6 Unit	140.000.000								6 Unit						
			Pengadaan Kendaraan Roda Empat					1 bh minibus,2 buah Pick Up	950.000.000								1 bh minibus,2 buah Pick Up	DINAS PUPR					
			penyusunan DED Pembangunan Kantor Dinas PUPR	Jumlah dokumen DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR yang disusun						1 dokumen	400.000.000						1 dokumen						
			pembangunan gedung kantor Dinas PUPR	Jumlah gedung Kantor Dinas PUPR yang dibangun								1 unit	15.000.000.000				1 unit						
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur					190 Stel	77.850.000								380 stell						

		Penyusunan Database Drainase dan trotoar			1 Dokumen	400.000.000								DINAS PUPR	
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan yang dibangun	2 ruas	5.919.550.000		-	1000m	15.000.000.000	500m	8.000.000.000	500m	8.000.000.000	DINAS PUPR	
		Pembangunan Jalan	Jumlah ruas jalan yang dibangun (Lanjutan Pembangunan Jalan ke Komplek Islamic Centre dan BKPSDM)	2 ruas	5.919.550.000			1000m	15.000.000.000	500m	8.000.000.000	500m	8.000.000.000	DINAS PUPR	
		Program Peningkatan Jalan dan Jembatan			500m	5.000.000.000									
		Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang mantap		500m	5.000.000.000							500 m	DINAS PUPR	
		Program pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	Trotoar yang ramah difabel		4.429.975.000	17.330.000.000		19.040.000.000		2.758.520.000		16.885.000.000		DINAS PUPR	
		Pembuatan DED Penditrian	Jumlah DED Penditrian yang disusun	1 dokumen	209.975.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	1 dokumen	DINAS PUPR	
		Pembangunan Trotoar	Terlaksananya pembangunan Trotoar : (13 lokasi)	4060 m	3.420.000.000	2900 m (Jl.St.Syahir)	16.530.000.000	5900 m ruas (Jl.Soekarno hatta)	18.240.000.000	343,6 (Jl.M.Yamin)	1.958.520.000	16.085.000.000		DINAS PUPR	
		Rehabilitasi Trotoar	Terlaksananya rehabilitasi Trotoar : (2 Lokasi)	750 m	800.000.000	750 m	800.000.000	750 m	800.000.000	750 m	800.000.000	750 m	800.000.000	DINAS PUPR	
			Rehab Trotoar RT 3 Silang Atas dari Kp. Jawa sampai ke Pernakaman											DINAS PUPR	
			Rehabilitasi Trotoar RT 13 Balai Balai											DINAS PUPR	
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase Drainase Rusak Yang di Perbaiki	1 tahun	300.000.000	1 tahun	315.000.000	1 tahun	330.750.000	1 tahun	347.287.500	1 tahun	364.651.875	DINAS PUPR	
		Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Panjang drainase/gorong-gorong yang dipelihara	1 tahun	300.000.000	1 tahun	315.000.000	1 tahun	330.750.000	1 tahun	347.287.500	1 tahun	364.651.875	DINAS PUPR	
		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharaanya Jalan dan Jembatan	1 tahun	12.398.855.000	1 tahun	22.107.755.000	1 tahun	22.513.755.000	1 tahun	24.820.805.000	1 tahun	21.723.957.500	DINAS PUPR	
		Pemeliharaan Periodik Jalan Dalam Kota	Terlaksananya pemeliharaan periodik jalan dalam kota :	1 tahun	3.214.500.000	1 tahun	11.500.000.000	1 tahun	13.000.000.000	1 tahun	15.400.000.000	1 tahun	12.500.000.000	5 tahun	DINAS PUPR
			Pengaspalan Jl. Adinegoro, Jl. Khatib Sulaiman, dan Jl. Lingkar Pasar Sayur											DINAS PUPR	
			Pengaspalan Komplek Pasar Pusat											DINAS PUPR	
		Pemeliharaan rutin berkala trotoar	panjang trotoar yang dipelihara	1 Tahun	400.000.000	1 Tahun	420.000.000	1 Tahun	441.000.000	1 Tahun	463.050.000	1 Tahun	486.202.500	5 tahun	DINAS PUPR
		Pemeliharaan rutin jalan dalam kota	Jumlah jalan dalam kota yang terpelihara	1 tahun	463.650.000	1 tahun	463.650.000	1 tahun	463.650.000	1 tahun	463.650.000	1 tahun	463.650.000	5 tahun	DINAS PUPR
		Penunjang DAK Infrastruktur Jalan	Jumlah Bidang DAK yang terlaksana	1 paket	44.900.000	1 paket	44.900.000	1 paket	44.900.000	1 paket	44.900.000	1 paket	44.900.000	DINAS PUPR	
		Penunjang DAK Infrastruktur jalan (Pemeliharaan Periodik)	Jumlah jalan dalam kota yang terpelihara secara periodik	1 paket	46.600.000	1 paket	50.000.000	1 paket	70.000.000	1 paket	85.000.000	1 paket	100.000.000	DINAS PUPR	
		Pengadaan alat berat mesin backhoe loader	Jumlah alat berat yang diadakan			1 unit	1.500.000.000							1 unit	
		Pengadaan Dump Truck	Jumlah alat berat yang diadakan						350.000.000					1 unit	
		Stamper							15.000.000					1 unit	
		Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Pick Up)									200.000.000			DINAS PUPR	
		breaker									15.000.000			1 unit	
		Genset									20.000.000				
		Kajian potensi pelebaran jalan	Jumlah dokumen kajian pelebaran jalan yang disusun	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen								DINAS PUPR	
		DAK Bidang Jalan	Jumlah paket jalan yang dibangun	2 paket	8.129.205.000	2 paket	8.129.205.000	2 paket	8.129.205.000	2 paket	8.129.205.000	2 paket	8.129.205.000	DINAS PUPR	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	panjang jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya yang dibangun	46.500 m	2.229.661.000	46.500 m	2.452.627.100	46.500 m	2.697.889.810	46.500 m	2.967.678.791	46.500 m	3.264.446.670	DINAS PUPR	
		Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi	Jumlah/panjang jaringan irigasi yang dipelihara	3.060 m	1.346.000.000	3.060 m	1.480.600.000	3.060 m	1.628.660.000	3.060 m	1.791.526.000	3.060 m	1.970.678.600	DINAS PUPR	
		Penunjang DAK Infrastruktur irigasi	Jumlah Bidang DAK yang terlaksana	1 Bidang	92.500.000	1 Bidang	101.860.000	1 Bidang	112.046.000	1 Bidang	123.250.600	1 Bidang	135.575.660	DINAS PUPR	

